

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejarah perkebunan kopi di Indonesia tidak lepas dari peran VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*). VOC pada awalnya menanam bibit kopi di sekitar Batavia (Jakarta), sampai ke daerah Bogor dan Sukabumi. Kemudian karena semakin tingginya permintaan pasar, mulai didirikan perkebunan kopi di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi.¹ Pada tahun 1798, VOC digantikan oleh Pemerintah Hindia Belanda, tetap mempertahankan sistem penyerahan kopi.² Tahun 1808, ketika Daendels tiba di Pulau Jawa hasil perkebunan kopi meningkat, tetapi mengalami penurunan di bawah penguasaan Inggris. Baru pada tahun 1814, perbaikan perkebunan kopi kembali dilakukan. Hasil perkebunan kemudian terlihat pada tahun 1817.³

Pada dasarnya di Indonesia dikenal dua jenis sistem perkebunan yaitu sistem kebun atau perkebunan tradisional dan sistem perkebunan Eropa (*European plantation*). Sistem kebun merupakan bagian dari sistem perekonomian pertanian tradisional. Sedangkan sistem perkebunan Eropa merupakan bagian dari sistem perekonomian pertanian komersial dan kapitalistik.⁴ Sistem perkebunan Eropa inilah yang kemudian dikemas dengan rapi dalam penerapan kebijakan *Gouvernements Koffiecultuur* atau Perkebunan Kopi Pemerintah.

¹ Devanny Gumulya, Ivana Stacia Helmi, *Kajian Budaya Minum Kopi di Indonesia*, (Jurnal Staf Program Studi Desain Produk, Universitas Pelita Harapan, Dimensi, Vol 13-No 2, 2017), hlm. 154.

² Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Laanen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hlm. 158-159.

³ Julius Kuneman, *Gouvernements Koffiecultuur Of Java*, (Martinus Nijhoff: S-Gravenhage, 1890), hlm. 1-2.

⁴ Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan Di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta, 1994), hlm. 3-4.

Tahun 1830, perbaikan perkebunan kopi secara massal muncul dalam bentuk *Gouvernements Koffiecultuur*. *Gouvernements Koffiecultuur* pertama kali dipraktekkan di Jawa yang dipelopori oleh Johannes van den Bosch.⁵ Menurut Kuneman, *Gouvernements Koffiecultuur* disebut juga dengan Budidaya Sukarela karena dalam pengaturan perkebunan kopi berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan para pekebun.⁶ *Gouvernements Koffiecultuur* berkembang di Jawa seperti Priangan, Buitenzorg (Bogor), Rembang, Kerawang, Jepara, Pasuruan, Tegal, Probolinggo, Preanger atau Priangan, dan Pekalongan. Pada tahun 1855 sampai 1856, perluasan penanaman kopi terus berlanjut seperti di Banten, Cirebon, Karawang, Kaliwungu, Selektan Kendal, Jepara, Surabaya, Banyuwangi, Banyumas, Bagelen, Kadu, Madiun, Pacitan dan Kediri. Kemudian karena semakin tingginya permintaan kopi di pasar dunia, *Gouvernements Koffiecultuur* mulai diterapkan di luar Jawa, seperti di Sumatra (Minangkabau dan Tapanuli), Sulawesi Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara.⁷

Sejarah perkebunan kopi Sulawesi dimulai pertama kali di wilayah Enrekang. Biji kopi yang ditanam meluas ke lereng-lereng Gunung Latimojong sekitar tahun 1750.⁸ Kopi yang terkenal dari Sulawesi adalah kopi “Bungin” (Bungin⁹ coffee) dikenal sebagai komoditas kelas dunia, kopi yang berasal dari dataran tinggi Duri – Sa’dan.¹⁰ Di Sulawesi Selatan daerah yang penting untuk penerapan kebijakan

⁵ Budi Agustono, dkk, *Sejarah Kopi Mandailing*, (Yogyakarta: Ombak, 2019), hlm.8.

⁶ Julius Kuneman, *op.cit.*, hlm. 183.

⁷ *Ibid.*, hlm. 24-27.

⁸ Cahaya Daeng Bulan, *Kopi Arabika Kalosi Enrekang*, (Cakke: SMK Negeri 4 Enrekang, 2021), hlm 273.

⁹ Kopi “Bungin” mendapat nama tersebut dari salah satu pelabuhan di Sulawesi Selatan, kopi yang ditanam di Duri dan dataran tinggi Sa’dan diekspor. Posisi Bungin sebagai pelabuhan bagi kopi dataran tinggi kemudian diambil alih oleh Pare-Pare.

¹⁰ Terance W. Bigalke, *Sejarah Sosial Tanah Toraja* (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm. 20-21.

Gouvernements Koffiecultuur, seperti di Palopo, Masamba, Rantepao, Makale, Enrekang dan Mamasa. *Onderafdeeling* Enrekang adalah salah satu daerah diterapkannya kebijakan *Gouvernements Koffiecultuur* yang akan kita bahas lebih detail. Penanaman kopi di *Onderafdeeling* Enrekang sebenarnya bukan merupakan hal yang baru dan telah ada sejak tahun 1750.¹¹ Syarat pohon-pohon kopi tumbuh dengan baik yaitu pada ketinggian 800 hingga 1000 meter di atas permukaan laut, tanah humus, dan pepohonan yang rimbun.¹² Selain itu kopi membutuhkan iklim yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu cerah. Tumbuhan ini hanya dapat membentuk bunga pada periode hari pendek. Periode hari pendek terletak di sebelah garis khatulistiwa termasuk di Enrekang.¹³ Kondisi geografis *Onderafdeeling* Enrekang yang 85% lokasinya dikelilingi oleh gunung dan bukit yang membentang di sepanjang wilayah dengan luas $\pm 2.000 \text{ Km}^2$ yang memungkinkan pohon kopi tumbuh dengan baik.¹⁴ Kondisi iklim dan letak geografisnya yang sebagian besar terdiri dari daerah pegunungan memungkinkan tumbuhnya segala macam tumbuhan. Tanaman yang paling menonjol adalah kentang, salak, kopi, cengkeh, ubi jalar dan kacang tanah.¹⁵ Dua alasan inilah yang membuat Pemerintah Hindia Belanda menjadikan *Onderafdeeling* Enrekang sebagai target penerapan *Gouvernements Koffiecultuur*.

Pada tahun 1906 Sulawesi Selatan seluruhnya telah berada dibawah kekuasaan langsung Pemerintah Hindia Belanda dan semua kekuatan politik lokal

¹¹ G. A Tideman, *Gegevens Over Land En Volk Van Enrekang*, (Kolonial Instituut, 1933), hlm. 1.

¹² Terance W. Bigalke, *Sejarah Sosial Tanah Toraja* (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm. 25.

¹³ Pudji Rahardjo, *Kopi Panduan Budi Daya dan Pengolahan Kopi Arabika dan Robusta*,(Jakarta: Penebar Swadaya, 2012). hlm. 30-31.

¹⁴ G. A Tideman, *loc.cit.*

¹⁵ Bambang Supeno dkk, *Geografi Budaya Daerah Sulawesi Selatan* (Ujung Pandang: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), hlm.3.

harus menandatangani Pernyataan Pendek (*Korte Verklaring*).¹⁶ Setelah penguasaan Pemerintah Hindia Belanda, wilayah Sulawesi Selatan dijadikan satu wilayah pemerintahan yang dikenal dengan Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahan (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*). *Onderafdeeling* Enrekang menjadi salah satu bagian dari *Afdeeling* Pare-Pare.¹⁷ Perbatasan *Onderafdeeling* Enrekang ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan dan daerah Bawahannya (*Gouvernement Celebes Onderhoorigheden*), ddo. 14 Oktober 1912 no. 5750/47 ditetapkan sebagai berikut: a) Berbatasan dengan *Onderafdeeling* Tana Toraja di sebelah Utara. b) Berbatasan dengan *Onderafdeeling* Luwu di sebelah Timur. c) Berbatasan dengan *Onderafdeeling* Pinrang disebelah Barat. d) Berbatasan dengan *Onderafdeeling* Sidenreng Rappang disebelah Selatan.¹⁸

Tahun 1912 Kepala Biro Ensiklopedia untuk keperluan *Gouvernements Koffiecultuur* melakukan perjalanan di kawasan perkebunan kopi Enrekang. Pada tahun 1913 Makale dan Enrekang didatangi oleh Adj. Inspecteur *Gouvernements Koffiecultuur*, ia membuat laporan untuk kepentingan para pejabat administrasi Eropa di Sulawesi Selatan (*Europeesche Bestuursambtenaren in Zuid-Celebes*).¹⁹ Hal ini mendorong Pemerintah Hindia Belanda untuk membuka *Gouvernements Koffiecultuur* di *Onderafdeeling* Enrekang. Perkebunan kopi di *Onderafdeeling* Enrekang muncul dalam bentuk *Gouvernements Koffiecultuur*. Menurut Paerels, *Gouvernements Koffiecultuur* di *Onderafdeeling* Enrekang disebut juga dengan

¹⁶ Edward L. Poelinggomang, *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 48-49.

¹⁷ G. A. Tideman, *op.cit.*, hlm. 1. “*Sadang*” menandakan sungai terbesar, sedangkan yang kecil “*Salo*”.

¹⁸ Mohammad Natsir Sitonda. *Darul Islam /Tentara Islam Indonesia di Massenrempulu, Studi Tentang Integrasi Gerilya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia*. (Makassar: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar, 2004), hlm. 66.

¹⁹ B.H. Paerels, *Agronomische beschrijving van de koffiecultuur in Zuidelijke Toradjalanden, Mededeelingen Afdeeling Landbouw No. 11*, (Batavia: Departement van Landbouw, Nijverheid, en Handel, 1927), hlm. 63.

Budidaya Sukarela, karena dalam prakteknya tidak menindas penduduk.²⁰ Oleh karena itu kajian ini ingin mengkaji mengapa Pemerintah Hindia Belanda menjadikan *Onderafdeeling* Enrekang sebagai tempat penerapan Kebijakan *Gouvernements Koffiecultuur* dan dampaknya terhadap masyarakat.

1.2. Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

Pada bulan Februari 1912, Kepala *Zelfbestuur* Makale mengeluarkan perintah bahwa semua kopi dari *onderafdeeling* tersebut hanya dapat diperdagangkan di *onderafdeeling* tersebut!. Peraturan tersebut berdampak pula pada perdagangan kopi yang berada di Duri yang sebelumnya pasar kopi terbesar berpusat di Kalosi yang terdapat di Duri. Semua kopi yang berasal dari Rantepao dan Makala melalui dikumpulkan di Kalosi akan dibawa ke Pare-Pare, dan selanjutnya dikirim ke Makassar. Perdagangan yang mapan di Kalosi dengan demikian terputus secara umum dari produk kopi Makale dan Rantepao kemudian juga sebagian besar diekspor melalui Rantepao.

Sejak Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan Budidaya Kopi Pemerintah (*Gouvernements Koffiecultuur*) di Sulawesi Selatan, pada saat inilah dikenal adanya budidaya kopi yang digerakkan oleh penduduk asli dan budidaya kopi yang diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda. Perkebunan dan perdagangan kopi diambil alih oleh mereka. Raja dan penduduk setempat harus mengikuti kebijakan tersebut, namun ada pula yang menolak. Banyak yang berubah dari kondisi perekonomian, seperti hilangnya monopoli perdagangan kopi penguasa lokal, pasokan di pasar dan harga, jalan dan alat transportasi.

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Selanjutnya akan di rumuskan masalah-masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, di antaranya:

1. Mengapa diberlakukannya *gouvernements koffiecultuur* ?
2. Bagaimana bentuk kebijakan *gouvernements koffiecultuur* ?
3. Apa dampak kebijakan *gouvernements koffiecultuur* terhadap aktivitas ekonomi di *Onderafdeeling* Enrekang ?

²⁰ *Ibid.*, hlm. 68.

Sebuah penelitian memerlukan batasan rencana penelitian ini dilakukan agar pengkajian yang dilakukan nanti dapat memperkecil kesalahan dan menghindari terjadinya *overlapping*. Dalam kajian penelitian Ilmu Sejarah yang berkaitan dengan batasan dalam penelitian sering disebut ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini mengacu pada batas temporal dan batas spasial. Batas spasial dalam penelitian ini adalah di Sulawesi Selatan berfokus pada *Onderafdeeling* Enrekang.

Secara periodisasi, batasan temporal dalam penelitian ini, dimulai pada tahun 1912 sampai 1938. Tahun 1912, sejak diberlakukannya kebijakan ekonomi yang dijalankan Pemerintah Hindia Belanda muncul dalam bentuk Budidaya Kopi Pemerintah (*Gouvernements Koffiecultuur*). Tahun 1923, hasil *Gouvernements Koffiecultuur* mulai terlihat pada tahun 1923. Tahun 1938 berkat modernisasi perkebunan tradisional panen kopi Bungin mengalami peningkatan yang luar biasa. Dengan demikian, penulis dapat menjelaskan tentang proses penerapan Budidaya Kopi Pemerintah (*Gouvernements Koffiecultuur*), dan pengaruh Budidaya Kopi Pemerintah (*Gouvernements Koffiecultuur*), terhadap aktivitas ekonomi di *Onderafdeeling* Enrekang setelah tahun 1912 hingga tahun 1938.

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai penerapan kebijakan ekonomi yang dijalankan Pemerintah Hindia Belanda bentuk Budidaya Kopi Pemerintah (*Gouvernements Koffiecultuur*). Menggambarkan alasan diberlakukannya kebijakan *Gouvernements Koffiecultuur*, proses jalannya *Gouvernements Koffiecultuur*, dan dampak terhadap aktivitas ekonomi di *Onderafdeeling* Enrekang tahun 1912 hingga tahun 1938.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu dapat menambah pengetahuan terhadap sejarah perkebunan dan perdagangan kopi di Enrekang. Di samping itu harapan penulis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah historiografi sejarah Indonesia khususnya sejarah dinamika perkebunan dan perdagangan kopi pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan. Kemudian manfaat lain yang dapat diperoleh untuk mahasiswa sejarah yaitu

memberikan informasi tentang bagaimana keadaan perkebunan dan perdagangan kopi pada masa itu khususnya di daerah Enrekang.

1.4. Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian dan tulisan telah dibuat menguraikan tentang perkebunan di Indonesia, tetapi sepengetahuan penulis, kajian tentang sejarah perkebunan di Sulawesi Selatan masih menjadi kajian yang terbatas, terkhusus kajian tentang perkebunan kopi (*koffiecultuur*) di Enrekang. Tulisan-tulisan tentang sejarah Enrekang pun masih sangat terbatas baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Hal demikian yang menjadi daya tarik penulis untuk dapat memberikan gambaran aktivitas perkebunan terkhusus zaman Pemerintahan Hindia Belanda.

Tulisan yang mengkaji tentang Sejarah *Massenrempulu* (*Onderafdeeling* Enrekang) menurut penulis masih sangat terbatas, tetapi penulis menemukan beberapa tulisan yang mengkaji tentang sejarah Enrekang yaitu tulisan karya Mohammad Natsir Sitonda berjudul “*Sejarah Massenrempulu jilid II*”. Tulisan ini membahas mengenai *Massenrempulu* yang merupakan suatu wilayah pemerintahan pada masa Ke-Aru-an yang dikenal dengan *Federasi Massenrempulu*. Menjelaskan tentang penguasaan bangsa asing di *Massenrempulu* pada tahun 1905-1942 yang menguasai seluruh Ke-Aru-an di Sulawesi dengan penandatanganan Pernyataan Pendek (*Korte Verklaring*). Penandatanganan Pernyataan Pendek (*Korte Verklaring*) merubah penetapan pemerintahan menjadi *Onderafdeeling* Enrekang dibawah *Afdeeling* Pare-Pare. Tetapi semua Ke-Aru-an di *Massenrempulu* tidak tinggal diam dengan penjajahan Belanda mereka melakukan perlawanan dengan membentuk pasukan *Laskar Massenrempulu*.²¹

Lain halnya dengan tulisan berjudul “*Jejak Perjuangan Para Raja Tandung Mataranna Massenrempulu Kabupaten Enrekang*” karya P. Buapala alias P. Rahmatia. Tulisan ini membahas sejarah perjuangan Biritta Puang Tosang dan kawan-kawan melawan Belanda pada awal abad ke-19, menjelaskan susunan pemerintahan Belanda di Enrekang dan adat istiadat di *Massenrempulu*. Tahun 1905-1906 merupakan masa dimana Pemerintah Hindia Belanda memperluas

²¹ Mohammad Natsir Sitonda, *Sejarah Massenrempulu Jilid II*, (Makassar: Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir, 2013), hlm. 3-13.

pengaruhnya di Sulawesi Selatan melalui penandatanganan Pernyataan Pendek (*Korte Verklaring*) oleh *Aru/Datu/Karaeng* di Sulawesi Selatan. Setelah penandatanganan *Korte Verklaring*, semua Ke-Aru-an harus tunduk dan patuh kepada Pemerintah Hindia Belanda.

Penulis juga menemukan beberapa tulisan yang membahas tentang sejarah perkebunan di Indonesia yaitu Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo yang berjudul *Sejarah Perkebunan di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi*. Tulisan ini membahas tentang sejarah perkembangan perkebunan di Indonesia, dimulai dari pengantar sejarah perkebunan yang dibagi atas dua bagian. Bagian pertama, meliputi periode VOC hingga zaman Hindia Belanda yang membahas tentang Sistem Tanam Paksa (1830-1870). Bagian kedua meliputi periode 1870 hingga 1942, selanjutnya pada Zaman Jepang (1942-1945), Jaman Revolusi (1945-1950), Masa Kemerdekaan (1950-1980-an. Tulisan ini memberikan gambaran bahwa perkebunan di Indonesia merupakan warisan dari perkembangan perkebunan masa kolonial. Sejarah perkebunan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme, dan modernisasi. Perkebunan hadir sebagai perpanjangan tangan dari perkembangan kapitalisme agraria Barat yang dikenal sebagai sistem perekonomian kolonial yaitu sistem perekonomian pertanian komersial (*commercial agriculture*).²²

Tulisan lain yang sangat menarik bagi penulis yaitu tulisan Budi Agustono, Junaidi, dan Kiki Maulana Affandi dengan judul buku *Sejarah Kopi Mandailing*. Tulisan ini menguraikan tentang kebijakan ekonomi Hindia Belanda dalam eksploitasi kopi di Keresidenan Tapanuli, dan upaya pemerintah kolonial Belanda dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk Tapanuli. Pada tahun 1825, langka pertama ekspansi dilancarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, selanjutnya menata wilayah sedemikian rupa. Tapanuli muncul dalam administrasi pemerintah Hindia Belanda sebagai ibukota *Noordelijke Afdeeling* (kawasan bagian utara) dari *Residentie van Padang en Onderhoorigheden* (Keresidenan Padang dan Daerah Taklukannya). Penataan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda

²² Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *op.cit.*, hlm.4-5.

dengan maksud untuk menundukkan wilayah pedalaman Tapanuli.²³ Pelaksanaan budidaya kopi di Keresidenan Tapanuli merupakan suatu bentuk kebijakan dan pranata ekonomi politik pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan yang dilakukan tentunya untuk mendapatkan keuntungan atas hasil komoditi dalam sektor pertanian. Meskipun dalam menjalankan kebijakan pemerintah Hindia Belanda mendapat respon penolakan dari masyarakat lokal, namun kebijakan tetap dilaksanakan.²⁴

Tulisan Razif, M. Fauzi, Noer Fauzi Rachman, dan Hilmar Farid dalam buku yang berjudul *Sejarah/Geografi Agraria Indonesia*. Tulisan ini membahas tentang kajian sejarah agraria di Indonesia yang terkait erat dengan proses pembuatan kebijakan.²⁵ Menurut Gunawan Wiradi, ahli agraria Indonesia, menjelaskan bahwa agraria mengacu pada perikehidupan manusia dengan tanah, dan hubungan antar manusia yang terbentuk di atas tanah. *Agraris Wet* yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda tahun 1870, menjadikan masyarakat desa sebagai subyek. Pengertian agraria dari penguasa kolonial bukan hanya sekedar istilah, tapi mempunyai implikasi politik dan keilmuan. Istilah agraria menjadikan kehidupan sosial dibentuk hanya mencerminkan kepentingan industri dan birokrasi. Istilah agraria yang dibuat bukan untuk memahami dan membantu kesejahteraan kehidupan sosial, tapi justru untuk membela dan mengatur demi kepentingan kapital dan birokrasi.²⁶

Tulisan Razif dalam buku ini, seorang peneliti Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) dengan judul *Sejarah Geografi Kapitalisme Di Sulawesi*. Dia menjelaskan bahwa sejarah agraria di Sulawesi terdiri dari dua ruang geografi. Pertama, ruang agraria pegunungan atau dataran tinggi, terdiri dari kaki pegunungan, di tengah pegunungan, dan di pedalaman pegunungan. Wilayah

²³ Budi Agustono, dkk, *op.cit.*, hlm 47.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 64.

²⁵ Razif, dkk., *Sejarah/Geografi Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: STPN Press, 2017), hlm. 1.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 7-8.

pegunungan terletak dibagian tengah, utara dan bagian selatan Pulau Sulawesi. Kedua, ruang agraria pesisir dan dataran rendah, seperti kota Makassar, Pangkajene, Mandar, Toraja Barat.²⁷

Sistem bagi hasil dari produk agraria di Sulawesi Selatan berlangsung pada tanah-tanah milik *Karaeng* atau *Aru*. Pembukaan lahan dibuka dengan sistem kerja rodi, dan selanjutnya dikerjakan oleh para petani dengan bagi hasil panen. Terdapat laporan berkaitan sistem bagi hasil pada penanaman jagung di Bonthain, dan bagi hasil penanaman tembakau dan kopi di Pangkajene dan Maros.²⁸ Pada pertengahan abad ke-19 Sulawesi Selatan menjadi kota yang memiliki daerah bisnis (*zekenbuurt*) tempat perniagaan orang-orang Cina, Eropa, Jepang dan Bugis. Di Wilayah tersebut menjadi tempat transaksi penjualan kopi dan kopra ke mancanegara dan sebaliknya transaksi tekstil, sepatu, dan garmen untuk keperluan Sulawesi Selatan.²⁹

Tulisan Terance W. Bigalke yang berjudul *Sejarah Sosial Tanah Toraja*. Tulisan ini pada umumnya membahas tentang kondisi sosial di Tanah Toraja memberikan gambaran kedatangan, ekspansi, dan perdagangan awal kopi di Sulawesi Selatan. Kopi yang terkenal sebagai komoditas kelas dunia yaitu kopi yang terdapat pada dataran tinggi Duri dan Sa'dan yang dikenal dengan kopi "Bungin" (*Bungin coffee*). Ada beberapa hal berdasarkan linguistik dan hortikultura yang menegaskan bahwa kopi masuk ke kawasan dataran tinggi ini sebelum Belanda memperkenalkannya ke Sulawesi tahun 1930-an. Van den Dijk seorang pemilik perkebunan Belanda tahun 1920-an melaporkan bahwa ia menemukan pohon-pohon kopi dengan perkiraan telah berusia 200 hingga 300 tahun. Merujuk pada laporan tersebut bahwa pedagang Arab kemungkinan memperkenalkan secara langsung kopi ke Sulawesi Selatan.³⁰

²⁷ *Ibid.*, hlm. 91.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 98.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 101.

³⁰ Terance W. Bigalke, *loc.cit.*

Berbeda dengan tulisan-tulisan yang telah dipaparkan, maka tulisan ini berusaha untuk mengkaji dinamika perkebunan kopi di *Onderafdeeling* Enrekang. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sistem perkebunan kopi setelah diberlakukannya Budidaya Kopi Pemerintah (*Gouvernements Koffiecultuur*) oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan yang memberikan dampak ekonomi bagi perkebunan kopi tradisional khususnya di *Onderafdeeling* Enrekang.

1.5. Landasan Konseptual Dan Pendekatan

Carl J. Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan atau kesulitan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai suatu tujuan.³¹

Perkembangan perkebunan di Indonesia sangat berhubungan erat dengan sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme, dan modernisasi. Perkembangan pada negara-negara berkembang merupakan perpanjangan tangan dari kapitalisme agraris Barat yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian kolonial. Di Indonesia dikenal dua jenis sistem perkebunan yaitu sistem perkebunan Eropa (*European plantation*) dan sistem kebun (*garden system*). Sistem kebun merupakan bagian dari sistem perekonomian pertanian tradisional. Sistem kebun diwujudkan dalam bentuk usaha kecil, tidak padat modal, penggunaan lahan terbatas, sumber tenaga kerja berpusat pada anggota keluarga, kurang berorientasi pada pasar dan lebih berorientasi pada kebutuhan sehari-hari.

Berbeda dengan sistem perkebunan yang merupakan bagian dari sistem perekonomian pertanian komersial dan kapitalis. Sistem perkebunan diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian skala besar dan terorganisir, bersifat pada modal (*capital intensive*), penggunaan areal pertanian yang cukup luas, organisasi tenaga kerja besar, pembagian kerja rinci, penggunaan tenaga kerja upahan (*wage labour*),

³¹Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014), hlm. 2.

struktur hubungan kerja yang rapi, penggunaan teknologi modern, spesialisasi, sistem administrasi dan birokrasi, penanaman tanaman komersial (*commercial crops*) yang ditujukan pada komoditi ekspor di pasaran dunia.³²

Teori tentang ekonomi yang dikembangkan oleh Marx dalam naskah-naskahnya tentang tulisan para ahli ekonomi. Ada dua kritik utama yaitu, pertama berkaitan dengan pendapat bahwa kondisi produksi yang menjadi ciri khas dari kapitalisme diakibatkan oleh semua bentuk ekonomi. Kedua, para ahli ekonomi menegaskan bahwa hanya pola-pola hubungan ekonomi yang murni saja yang bisa ditangani *in abstracto* atau secara teoritis. Kapital, komoditi, harga dan seterusnya mempunyai jiwa sendiri di luar pengaruh penangan manusia. Para ahli ekonomi menempatkan buruh sebagai “ongkos-ongkos” bagi pemilik modal atau dianggap sebagai pengeluaran-pengeluaran penting lainnya.³³

Fakta bahwa makin maju kapitalisme, akan semakin miskin pula si buruh. Kekayaan melimpah merupakan ciri-ciri produksi kapitalisme yang ditunjang oleh pemilik tanah dan pemilik modal. Pokok pembahasan Marx adalah bahwa di dalam kapitalisme obyek-obyek material yang diproduksi sejajar dengan buruh itu sendiri, sama halnya dengan barang-barang tersebut berada pada tingkat teoritis murni dalam disiplin ekonomi. Kapitalisme membuat buruh menjadi komoditi yang lebih murah dengan semakin banyaknya barang yang dihasilkan. Si buruh (subjek, pencipta) telah membaur dengan produksinya (objek).³⁴

Dalam kapitalisme, baik teori dan prakteknya, bahwa kehidupan dan kebutuhan-kebutuhan manusia tampak bagaikan ditentukan terlepas dari keanggotaannya di dalam masyarakat. Buruh-buruh upahan berada pada kondisi

³² Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *op.,cit*, hlm. 3-4.

³³ Anthony Giddens, *Kapitalisme, Dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hlm 12-13.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

kegiatan produktifnya yang dilakukan semata-mata untuk kebutuhan pokok agar tetap dapat mempertahankan hidup.³⁵

Pada konteks inilah Kebijakan *Gouvernements Koffiecultuurs* adalah upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan keuntungan dalam bidang ekonomi yang dikontrol dalam suatu negara Hindia Belanda. Tindakan kebijakan ekonomi yang dijalankan di Sulawesi Selatan sama halnya seperti yang terjadi di Tapanuli. Bentuk dari kebijakan ekonomi pemerintah Hindia Belanda muncul dalam bentuk Budidaya Kopi Pemerintah (*Gouvernements Koffiecultuur*). Namun kebijakan ini masih sebatas percobaan pemerintah untuk menjadikan seluruh daerah Minangkabau dan Tapanuli sebagai Jawa kedua.³⁶

Praktek kebijakan *Gouvernements Koffiecultuur* penduduk mendapat tekanan terhadap sektor ekonomi khususnya komoditi kopi yang satu-satunya tanaman yang diwajibkan. Untuk melancarkan budidaya tersebut pemerintah Hindia Belanda membangun suatu sistem administrasi dalam pengelolaannya yaitu pertama Gubernur yang menjadi orang pertama yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut, selanjutnya dikontrol oleh bawahannya seperti residen, asisten residen dan kontrolir serta *volkschoofden* (pemuka-pemuka masyarakat).³⁷

1.6. Sumber Penulisan dan Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan peneliti untuk menemukan jalan pemecahan suatu masalah yang akan ditulis secara sistematis untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik. Adapun metode yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan pada rumusan masalah dengan menggunakan prosedur penelitian sejarah yaitu, Pengumpulan Sumber yang merupakan studi pustaka (*library research*) dan studi arsip, yaitu penulis melakukan pencarian dan pengumpulan data-data tertulis mengenai arsip tentang budidaya dan perdagangan kopi pemerintah Hindia Belanda

³⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

³⁶ Budi Agustono, dkk, *Sejarah Kopi Mandailing*, (Yogyakarta: Ombak, 2019), hlm 3.

³⁷ *Ibid.*, hlm 3-4.

di *Onderafdeeling* Enrekang yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen, artikel, dan surat-surat resmi yang relevan dengan objek yang diteliti.

Penulis melakukan pencarian dengan membuka website Arsip Nasional Republik Indonesia dan website Delpher yang merupakan arsip Belanda. Penulis banyak mendapatkan sumber yang begitu penting seperti *Memory Van Overgave* (Naska Serah Terima Jabatan), merupakan sumber yang sangat membantu penulis untuk memberikan gambaran kondisi wilayah di *Onderafdeeling* Enrekang pada zaman Hindia Belanda.³⁸ Sumber selanjutnya yaitu *Gegevens Over Land En Volk Van Enrekang* (Informasi Tentang Tanah Dan Rakyat Enrekang), dan sumber yang tidak kalah pentingnya bagi penulis yaitu laporan B.H. Paerels, tentang Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan, Bagian Pertanian "Deskripsi Agronomi Budidaya Kopi di Bagian Selatan Toraja" (*Departement Van Landbouw, Nijverheid En Handel, Agronomische Beschrijving Van De Koffiecultuur In De Zuidelijke Toradjalanden, Landsdrukkerij Weltevreden*. 1927). Sumber ini memberikan informasi yang sangat detail tentang perkebunan kopi di Duri yang masuk dalam *Onderafdeeling* Enrekang.

Kritik sumber, pada tahap ini yang dilakukan oleh penulis adalah melihat kembali sumber yang telah dikumpulkan kemudian menguji tingkat kredibilitasnya, sehingga tidak keluar dari ruang lingkup waktu yang dikaji. Kritik sumber yaitu kritik intern dan kritik ekstern terhadap berbagai macam buku, arsip, artikel, dan profil. Kritik intern yang peneliti lakukan adalah dengan mengadakan penilaian berdasarkan sumber itu sendiri, membandingkan kesaksian dari berbagai sumber. Kritik ekstern yang peneliti lakukan adalah dengan melihat kembali beberapa sumber misalnya dokumen apakah asli atau tidak, seperti dengan melihat jenis kata. Penulis memberikan batasan dari sumber-sumber tersebut dengan mempertanyakan; di mana sumber itu dibuat (lokasi); siapa yang membuat (pengarang); dan bahan sumber itu dibuat (analisis); apakah sumber tersebut asli (otentik); nilai bukti apakah yang ada didalamnya (kredibilitas).

³⁸ Mona Lohanda, *Membaca Sumber Menulis Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2019), hlm. 49.

Interpretasi, pada tahap ini data yang diperoleh kemudian diseleksi, dimana penulis berusaha menentukan data mana yang akan digunakan dalam penulisan karya yang ditulis. Dengan tujuan agar penulisan dapat diketahui secara pasti mana data primer dan data sekunder. Data primer merupakan arsip-arsip yang memiliki kaitan dengan pembahasan penulis, sedangkan data sekunder merupakan data yang berupa buku-buku, jurnal, data internet yang berhubungan dengan yang ditulis, sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan karya ini.

Selanjutnya *Historiografi* atau penulisan sejarah merupakan tahap akhir dalam metode penelitian sejarah. Pada tahap ini penulis sudah menyusun ide-ide tentang hubungan satu fakta dengan fakta lainnya melalui *Interpretasi*. Hasil deskripsi dirangkum dalam sebuah kajian penelitian, dengan merekonstruksi peristiwa-peristiwa masa lalu.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan hal-hal yang akan diuraikan tanpa melepaskan diri dari persoalan yang akan dijawab dari rumusan masalah. Untuk mendapatkan gambaran sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu diadakan susunan pembahasan yang diuraikan dalam beberapa bab dan sub bab.

Tesis ini terdiri dari lima (6) bab. Pada bab pertama berisi tentang pendahuluan yang bertujuan untuk mengantar pembaca memahami materi pembahasan selanjutnya. Bab ini meliputi latar belakang dan masalah dan ruang lingkup penelitian yang menjadi pokok pembahasan tulisan ini. Uraian berikutnya tujuan dan manfaat penelitian yang memuat alasan-alasan tentang penulisan tesis ini. Berikutnya yaitu tinjauan pustaka untuk mengetahui data dan bagaimana tulisan ini dikaji oleh para penulis sebelumnya, serta memaparkan bedanya dengan penulisan tesis ini. Berikutnya landasan konseptual dan pendekatan, memberikan kerangka teori dengan tujuan mengarahkan penelitian yang dilakukan dan terakhir yaitu metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

Bab kedua menguraikan tentang kondisi geografi *Onderafdeeling* Enrekang, kondisi sosial budaya *Onderafdeeling* Enrekang, kondisi ekonomi dan sejarah singkat *Onderafdeeling* Enrekang. Bab ketiga menguraikan mengenai sejarah perkebunan di *Onderafdeeling* Enrekang, jenis-jenis perkebunan, perdagangan kopi dan Perang Kopi.

Bab keempat menguraikan tentang alasan penerapan Kebijakan *Gouvernements Koffiecultuur* dan upaya Pemerintah Hindia Belanda dalam menerapkan Kebijakan *Gouvernements Koffiecultuur* mulai dari pembukaan lahan, bedeng pembibitan, pembibitan, penanaman, terasering, pemupukan, pemangkasan, tumpeng sari, dan penaung. Selain itu memperkenalkan cara dalam penanganan penyakit dan hama pada pohon kopi dan perbaikan dalam panen dan pengolahan untuk mendapatkan hasil dan produksi kopi yang bermutu.

Bab kelima berisi tentang dampak Kebijakan *Gouvernement Koffiecultuur* di *Onderafdeeling* Enrekang tahun 1912-1938. Dampak kebijakan *Gouvernements Koffiecultuur* terhadap perkebunan tradisional yaitu Pemerintah Hindia Belanda melakukan modernisasi terhadap perkebunan tradisional. Modernisasi perkebunan kopi tradisional yaitu Pemerintah Hindia Belanda melakukan perawatan dan menyediakan bibit Kopi Arabika dan untuk kepentingan perdagangan memberikan label Kopi Bungin untuk kopi yang berasal dari Enrekan. Selain itu memberikan dampak pada meningkatnya aktivitas perdagangan kopi yang meliputi organisasi perdagangan kopi, pasokan dan harga di pasar, alat pengangkutan kopi dan pajak produk di pasar.

Bab keenam yaitu penutup, berisi tentang kesimpulan. Kesimpulan merupakan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

BAB II

ONDERAFDEELING ENREKANG ZAMAN HINDIA BELANDA

2.1. Kondisi Geografis dan Administrasi di *Onderafdeeling* Enrekang

Istilah *Massenrempulu* dalam versi bahasa orang Bugis berasal dari kata *Massere – Bulu* yang berarti daerah sekitar pegunungan. Mengapa orang bugis mengatakan demikian dapat dimengerti sebab 85% lokasi *Massenrempulu* dikelilingi oleh gunung dan bukit yang membentang di sepanjang wilayah *Massenrempulu* yang luasnya $\pm 2.000 \text{ Km}^2$.¹ Pengertian istilah *Massenrempulu* berdasarkan versi Belanda *Massenreng – sepanjang, mpulu – pegunungan*, jadi *Massenrempulu* adalah sepanjang gunung.² Berdasarkan toponim masyarakat Enrekang, kata Enrekang berasal dari *Endeki* yang artinya *Naik dari* atau *Panjang* yang merupakan asal mulanya sebutan *Endekan* atau Enrekang.³

Onderafdeeling Enrekang terletak di bagian paling utara Sulawesi Selatan, kira-kira antara 30° 20' dan 3° 50' Lintang Selatan dan 119° 40' dan 120° 5' Bujur Timur, dan terdiri *Zelfbestuur* Lanskap: Enrekang, Maiwa, Alla. Maluwa dan Buntu Batu. Buntu Batu, Maluwa dan Alla membentuk federasi Duri. Luas *Onderafdeeling* Enrekang diperkirakan lebih dari 2000 km yaitu: Enrekang 400 km², Maiwa 600 km², Alla 400 km², Maluwa 350 km² dan Buntu Batu 250 km².⁴

Massenrempulu merupakan salah satu bagian dari *Afdeeling* Pare-Pare, disebut *Onderafdeeling* Enrekang daerah ini tidak memiliki wilayah pantai dan danau melainkan sungai yakni Sungai Mata Allo dan Sungai Saddang yang melalui

¹ G. A Tideman, *Gegevens Over Land En Volk Van Enrekang*, (Kolonial Instituut, 1933), hlm. 1.

² J.A. Scheffelaar, *Memorie Van Overgave Van De Onderafdeeling Enrekang*, (Makassar: Celebes Drukkerij, 1937), hlm. 110.

³ Mohammad Natsir Sitonda, *Sejarah Massenrempulu Jilid I*, (Makassar: Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir, 2012), hlm. 18.

⁴ J.A. Scheffelaar, *op.cit.*, hlm. 1.

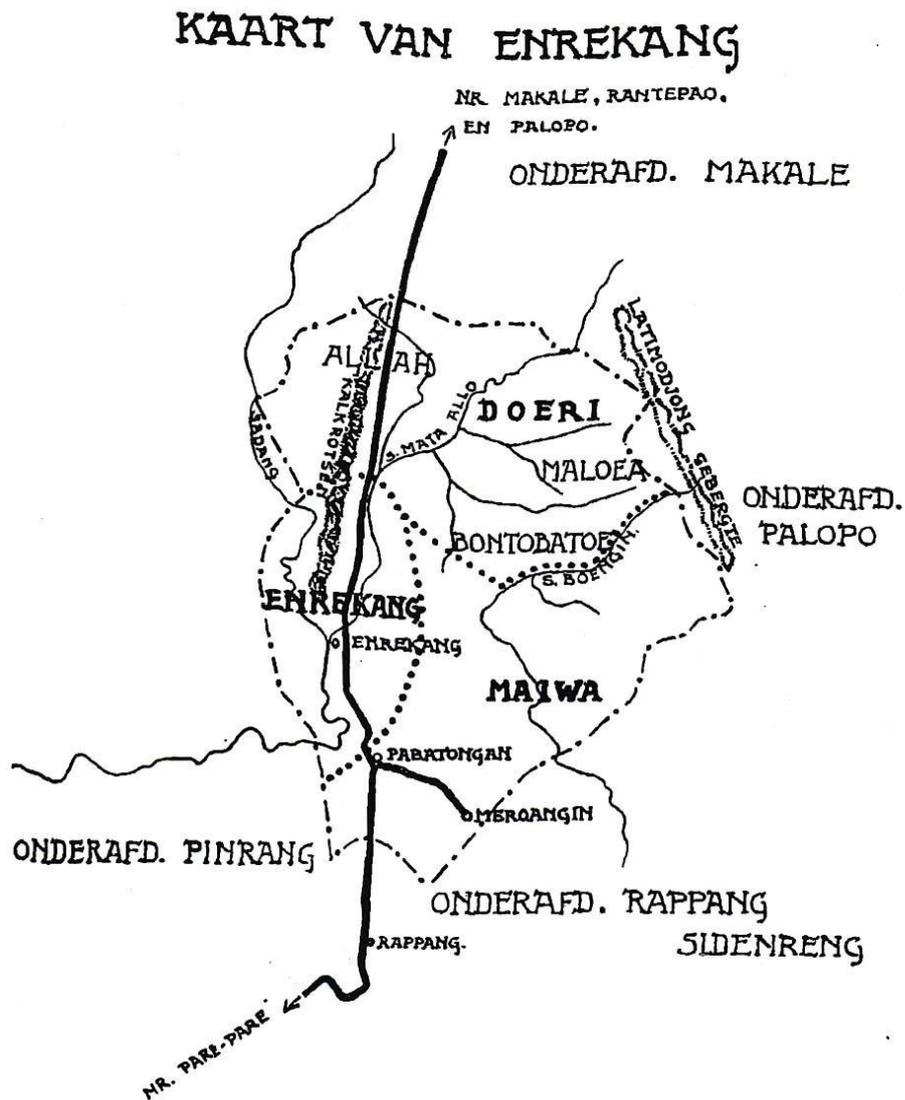
Zelfbestuur Enrekang.⁵ Perbatasan *Massenrempulu* ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan dan daerah Bawahannya (*Gouvernement Celebes Onderhoorigheden*), ddo. 14 Oktober 1912 no. 5750/47 ditetapkan sebagai berikut: a) Berbatasan dengan *Onderafdeeling* Tana Toraja di sebelah Utara. b) Berbatasan dengan *Onderafdeeling* Luwu di sebelah Timur. c) Berbatasan dengan *Onderafdeeling* Pinrang disebelah Barat. d) Berbatasan dengan *Onderafdeeling* Sidenreng Rappang disebelah Selatan.⁶

Garis perbatasan tersebut adalah: a) Berbatasan dengan *Onderafdeeling* Tana Toraja di sebelah Utara, meliputi dari Boentoe-Sikolong (Puncak Pegunungan Latimojong) di arah menuju Salo Roni; mengikuti sungai ini ke hilir sampai ke kampung Bala. Dari sini dalam garis lurus ke Salo Malino dan ikuti sungai ini ke hilir ke tempat ia bertemu kembali dengan Salubarani. Mengikuti Salobarani ke hulu di sepanjang tepi utara dari kampung Garotin dan dari sini ke titik di mana Salo Meso jatuh ke Salobarani, Salo Meso hulu ke asalnya di Pegunungan Sambora. b) Berbatasan dengan *Onderafdeeling* Luwu di sebelah Timur, dari Batu-Bolong melewati Rante Kambola sampai ke Boeloe-Sikolang. c) Berbatasan dengan *Onderafdeeling* Pinrang di sebelah Barat, meliputi Sadang hulu ke muara anak sungai sebelah kanannya, Salo Basean, terus melewati puncak: Rappo, Surakan, Tondong, Palelang, Lombo, Kaceng, dataran tinggi Appang-Appang, puncak Dante-Bange, Batu-Mekong, hingga Patara Lemba, ke selatan sampai dasar aliran sungai Sadang bertemu antara kampung Pudete (Enrekang) dan kampung Bulisou (Kassa); lebih jauh di atas Buntu-Karrang, Bukit Tanete-Lattu-E, dataran tinggi Awo-Kawu, Bukit Buwung-AsuE, dari sana di atas dataran tinggi Tanahbiring, pohon yang dikenal Cenrana-Ballu, pohon Waringin yang dikenal Anjuava Tanange dan dari sini ke hilir sepanjang Salo Biru ke Kumu-Kumu. d) Berbatasan

⁵ G. A. Tideman, *op.cit.*, hlm. 1. “*Sadang*” menandakan sungai terbesar, sedangkan yang kecil “*Salo*”.

⁶ Mohammad Natsir Sitonda. *Darul Islam /Tentara Islam Indonesia di Massenrempulu, Studi Tentang Integrasi Gerilya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia*. (Makassar: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar, 2004), hlm. 66.

dengan *Onderafdeeling* Sidenreng Rappang disebelah Selatan, meliputi dari Kumu-Kumu sepanjang garis Barat-Timur sampai bertemu dengan Salo Bulu; mengikutinya ke hilir sampai jatuh ke Salo-Dua, lalu sepanjang jalur ke timur melewati Manu-Manu dan Buntu-Lumajan ke Salo Kalama dan menyusuri sungai ini sampai masuk ke hilir sungai ini di air terjun Sadang Kalimpang.⁷



Peta. 2.1. Peta Enrekang.
(Sumber: G. A. Tideman, 1933).

⁷ J.A. Scheffelaar, *op.cit.*, hlm. 2.

Menurut pencatatan penduduk pada tahun 1930, jumlah seluruh penduduk yang mendiami daerah Sulawesi Selatan termasuk wilayah daerah Sulawesi Tenggara sebanyak 3.093.251 orang. Jumlah ini termasuk orang-orang Eropa, Cina, dan Timur Asing lainnya. Jumlah penduduk yang mendiami wilayah di Sulawesi Selatan sejumlah 2.692.850 orang. Jumlah penduduk ini meningkat menjadi 3.573.440 orang pada tahun 1953. Dengan demikian pertambahan penduduk dalam jangka waktu 23 tahun sebanyak 880.590 orang.⁸

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk di *Onderafdeeling* Enrekang tahun 1930.

No	Zelfbestuur	Jumlah penduduk						Total
		Pribumi		Eropa		Cina		
		L	P	L	P	L	P	
1	Alla	10.750	11.091	-	-	6	3	21.850
2	Buntu Batu	5.569	5.759	-	-	-	-	11.328
3	Enrekang	7.353	7.930	15	13	34	21	15.366
4	Maiwa	7.205	8.045	-	-	3	1	15.254
5	Malua	6.190	6.302	-	-	-	-	12.492

Sumber: *Volkstelling 1930/Census of 1930 in the Netherlands Indies*, 8 vols, Nationaal Archief

Penduduk *Massenrempulu* tahun 1930 berjumlah 76.290 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki pribumi sebanyak 37.067 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan pribumi sebanyak 39.127 jiwa. Penduduk asing orang Cina berjumlah 68 jiwa yaitu, laki-laki sebanyak 43 jiwa dan perempuan sebanyak 25 jiwa. Jumlah penduduk orang Eropa hanya 28 jiwa yaitu, laki-laki sebanyak 15 jiwa dan

⁸ Haruna Kadir, dkk, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan (1945-1950)*, (Makassar: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan dan Universitas Hasanuddin, 1984), hlm. 31.

perempuan 13 jiwa. Jumlah penduduk tiap *Zelfbestuur* yaitu *Zelfbestuur* Alla sebanyak 21.850 jiwa, *Zelfbestuur* Buntu Batu sebanyak 11.328 jiwa, *Zelfbestuur* Enrekang sebanyak 15.366 jiwa, *Zelfbestuur* Maiwa sebanyak 15.254 jiwa dan *Zelfbestuur* Malua sebanyak 12.492 jiwa.⁹

Berdasarkan sensus penduduk di *Onderafdeeling* Enrekang tahun 1937 berjumlah 79.084 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki dewasa sebanyak 20.189 dan jumlah anak laki-laki sebanyak 18.689. Jumlah penduduk perempuan dewasa sebanyak 22.788 dan jumlah perempuan anak perempuan 17.418.¹⁰

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk *Onderafdeeling* Enrekang tahun 1937.

No	Nama kampung	Jumlah orang dewasa		Jumlah anak-anak		Total Jiwa
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	Enrekang	3958	4611	3908	3340	15817
2	Buntu Batu	3013	5207	2377	2332	10929
3	Alla	2157	2412	1996	1873	8438
4	Baroko	3583	3878	3271	3248	13980
5	Malua	604	684	644	620	2552
6	Sossok	1904	2131	1857	1800	7692
7	Banti	1094	1152	976	950	4172
8	Maiwa	3876	4713	3660	3255	15504

Sumber: J.A. Scheffelaar, 1937, Nationaalarchief.

Pada dasarnya keadaan geografis *Massenrempulu* terdiri atas pegunungan, daratan dan hutan-hutan yang lebat serta lereng-lereng yang juga banyak ditumbuhi pepohonan. Sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia, *Massenrempulu* juga mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan (rekaman curah hujan

⁹ *Volkstelling 1930/Census of 1930 in the Netherlands Indies*, 8 vols. (Batavia: Landsdrukkerij, 1933) hlm. 6.

¹⁰ J.A. Scheffelaar, *op.cit*, lampiran 7.

terlampir 1).¹¹ Keadaan alam dan letak geografisnya yang sebagian besar terdiri dari daerah pegunungan memungkinkan tumbuhnya segala macam tumbuhan. Tanaman yang paling menonjol adalah kentang, salak, kopi, cengkeh, ubi jalar dan kacang tanah.

Pada tahun 1919 penduduk *Massenrempulu* hidup dari hasil pertanian seperti ubi jalar, kacang tanah, jagung dan kentang. Budidaya padi terdapat di *Zelfbestuur* Maiwa dan Enrekang, sementara di sekitar daerah pegunungan Latimojong di Duri belum terlalu banyak persawahan. Duri bukanlah penghasil beras, tanahnya terlalu miskin dan tidak memiliki banyak air. Duri lebih merupakan lahan hortikultura¹² dan nyaris tidak dapat memenuhi permintaan sendiri untuk beras. Beras yang paling dicari oleh penduduk tumbuh di daerah Bone dan Tantido.¹³

Beberapa daerah panen dua kali per tahun. Di daerah pegunungan menanam padi pada bulan Desember dan Januari, di daerah-daerah yang lebih rendah *Zelfbestuur* Enrekang (ketinggian 150 M) pada bulan Januari dan Februari, sedangkan di *Zelfbestuur* Maiwa pada Maret dan April. Namun daerah-daerah yang tidak memiliki cukup air, sawah yang kering ditanami jagung. Di *Zelfbestuur* Alla merupakan pusat budidaya kopi, selain beras dan kopi yang menjadi mata pencaharian di *Zelfbestuur* Enrekang terdapat juga tembakau.¹⁴

Kopi tumbuh baik pada iklim yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu cerah. Pergantian tahun kering dan basah setiap tahunnya dipengaruhi oleh angin monsun barat dan monsun timur. Pada permulaan monsun barat, angin barat bergerak secara perlahan ke selatan dan kemudian ke timur mengakibatkan tingginya curah hujan.

¹¹ Bambang Supeno dkk, *Geografi Budaya Daerah Sulawesi Selatan* (Ujung Pandang: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), hlm.3.

¹² Hortikultura (*horticulture*) berasal dari bahasa latin *hortus* (tanaman kebun) dan *culture/colere* (budidaya), yang berarti budidaya tanaman kebun.

¹³ G. A. Tideman, *op,cit.*, hlm. 9.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 7-8.

Pada monsun timur, angin timur bergerak secara ke selatan dan kemudian ke barat mengakibatkan musim kemarau. Pada pusat-pusat perkebunan kopi di *Onderafdeeling* Enrekang pergantian tahun kering dan tahun basah dengan monsun timur paling menonjol. Dari tahun 1907-1910 tahun basah, 1911-1914 tahun kering, 1915-1917 tahun basah, 1918-1919 tahun kering, 1920-1921 tahun basah, 1923-1924 tahun kering.¹⁵

Tabel 2.3. Menunjukkan curah hujan bulan Oktober 1907, di Enrekang.

Tahun	Jan	Feb	Mart	Apr	Mai	Juni	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Total
1907										77	138	209	-
1908	140	228	222	168	148	210	100	245	63	112	281	123	2040
1909	156	232	169	458	274	173	205	91	90	162	124	91	2225
1910	297	253	282	222	148	306	219	167	124	289	208	122	2637
1911	212	176	87	208	320	163	5	?	45	173	34	?	?
1912	222	440	310	248	212	260	189	41	13	29	229	509	2702
1913	245	147	274	293	317	262	105	24	17	96	121	304	2205
1914	427	233	90	279	174	193	10	0	0	72	175	232	1885
1915	274	342	292	301	559	72	70	19	264	146	142	176	2657
1916	229	126	170	163	141	81	432	255	112	247	196	75	2227
1917	184	295	260	263	214	130	230	160	95	293	179	200	2503
1918	414	308	166	153	242	56	1	0	2	114	231	305	1992
1919	109	154	485	371	165	309	171	66	143	100	312	310	2845
1920	259	429	172	188	264	138	141	46	37	30	146	265	1965

¹⁵ B.H. Paerels, *Agronomische beschrijving van de koffiecultuur in de Zuidelijke Toradjalanden, Mededeelingen Afdeeling Landbouw No. 11*, (Batavia: Departement van Landbouw, Nijverheid, en Handel, 1927), hlm. 13.

1921	223	398	151	116	280	49	45	77	189	206	306	399	2439
1922	144	173	208	286	201	219	69	28	58	57	89	314	1846
1923	150	244	133	297									
1924	-												
1925	96	186 ½	126	135 ½	284	284 ½	99	44 ½	-	25	67	231 ½	1543½
1926	337	241	220	121	175 ½	106	93 ½	64	-	97 ½	100	376	1931½
1927	82	189	405	505 ½	128	189	41	3½	27 ½	27 ½	197	279	2071
1928	377	135	462	280 ½	99 ½	196 ½	74 ½	42	53	152 ½	98 ½	172	2143
1929	144	242 ½	-	190	216	172 ½	102	36	47	2½	126 ½	171	1450
1930	144	140 ½	361	465	297	100	17	10 ½	1	480	106	208 ½	2330½
1931	44 ½	68	132	349	357	422 ½	141	83	114	114	200 ½	121	2146½
1932	196	115	167 ½	381	302	68	97	107	53	106	187	224	2003½
1933	138 ½	210 ½	160	313 ½	312	127 ½	32	99	42 ½	158	300 ½	76 ½	1970½
1934	176 ½	150	168 ½	181	158	267	417	67	227	182 ½	252	173 ½	2420
1935	150	392	203 ½	412 ½	195 ½	254 ½	37	17 ½	39	77 ½	211 ½	434 ½	2425
1936	291 ½	256	299 ½	533	298 ½	193	27	58 ½	89 ½	18	195	125	2384½
1937	256	187 ½	273 ½	285 ½									

Sumber: J.A. Scheffelaar, 1937, Nationaalarchief.

Di *Massenrempulu* beberapa masyarakat khususnya laki-laki dipekerjakan untuk membuat jalan raya. Mereka harus meninggalkan keluarganya selama

delapan hari, dengan berbekal nasi jagung (*rido dalle*)¹⁶. Beberapa penduduk khususnya laki-laki diperintahkan langsung oleh pemerintah lokal (*Puang*) untuk membuat jalan raya seperti membawa pasir, menggali tanah, dll. *Puang* ini sebelumnya telah mendapat perintah dari Pemerintah Hindia Belanda.

Sesuai dengan keadaan alamnya yang sebagian besar terdiri dari daerah pegunungan maka penduduk *Massenrempulu* hidup dari penghasilan bertani, berdagang dan mengelola hutan. Misalnya di *Zelfbestuur* Maiwa hampir 90% penduduknya memiliki mata pencaharian mengelola hasil hutan, dimana hasilnya adalah kayu untuk bahan bangunan, rotan, damar serta sebagian menyadap tuak (*enau*) yang kemudian dimasak dan menghasilkan gula merah yang merupakan hasil utama penduduk *Zelfbestuur* Maiwa.¹⁷

Seperti telah disebutkan diatas, penduduk membudidayakan kopi tanaman jangka panjang bagi Pemerintah Hindia Belanda di pekarangan dan di kebun. *Zelfbestuur* Alla mungkin pusat kopi tertua di Sulawesi Selatan. Bahkan kopi juga ditanam di Maiwa. Kopi itu disebut kawa. Sejak tahun 1919 kopi di tanam di kampung. Pada tahun 1930 jumlah sekitar f 35, f 50.- per pikul.

Upaya untuk menemukan budidaya ikan mas berhasil. Terutama melalui media guru sekolah rakyat sehingga di berbagai tempat berhasil membudidayakan ikan mas. Pada saat ini sering ditemukan berbagai daerah memiliki kolam yang terdapat ikan mas. Hasil dari hutan adalah kayu (damar dan rotan), tapi tidak banyak hutan di *Massenrempulu* hanya di sepanjang tepi Sungai Saddang dan Sungai Riso di Selatan Malaliang dan Barat sampai Pinrang. Di *Zelfbestuur* Maiwa dari bukit dan di lereng hutan pegunungan Latimojong ditemukan jenis kayu (*asa*, *mea* dan *buangin*) yang sangat bagus dengan panjang 1 m dan lebar 1dm.¹⁸

¹⁶ *Rido dalle* merupakan makanan pokok penduduk yang terbuat dari jagung yang dikeringkan, kemudian ditumbuk dengan *issong* sehingga menjadi bagian-bagian kecil. *Issong* merupakan alat yang digunakan untuk menumbuk jagung atau padi.

¹⁷ G. A. Tideman, *loc.cit.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm.8-9.

Sebelum penandatanganan *Korte Verklaring* sistem pemerintahan yang berlaku secara umum di Sulawesi Selatan terkhusus di *Massenrempulu* yaitu sistem pemerintahan tradisional. Istilah pemerintahan tradisional adalah struktur pemerintahan pribumi yang belum tersentuh pengaruh-pengaruh Belanda.¹⁹ Sistem politik lokal mengharuskan semua bangsawan murni dari generasi *Tu'manurung* harus diberi jabatan yang sesuai dengan tingkat kemurnian darahnya, jabatan yang dimaksud yaitu di peringkat kerajaan pusat maupun di daerah bawahan.²⁰

Menurut Friederich, masyarakat Sulawesi Selatan pada dasarnya terdiri dari dua lapisan sosial yaitu lapisan bangsawan (*Anak Arung*) dan orang merdeka (*Maradeka*). *Ata* merupakan lapisan pelengkap mengikuti pertumbuhan kehidupan di Sulawesi Selatan. Berdasarkan *La Galigo* dan mitos tentang nenek moyang Bugis, dikenal dua jenis manusia yaitu mereka yang berdarah putih yaitu keturunan bangsawan atau *dewata*, dan mereka yang berdarah merah yaitu rakyat jelata atau budak. Pembagian lapisan sosial tersebut bersifat mutlak dan tidak boleh saling dicampurkan. Namun dalam prakteknya, perkawinan diantara dua lapisan ini tidak hanya dibolehkan namun sering terjadi, sehingga adanya status kalangan lapisan menengah yang berada diantara bangsawan tertinggi dengan budak terendah. Bangsawan yang masih mempercayai dirinya sebagai keturunan dewa akan mengakui bahwa perkawinan antar golongan telah menciptakan darah putih dalam tubuh bangsawan tinggi sekalipun sebenarnya sudah tidak murni lagi.

Menurut James Brooke dalam jurnal kunjungannya ke Sulawesi Selatan pada tahun 1845:

“Tidak ada bangsa yang melebihi mereka dalam hal pengagungan terhadap status kebangsawanan, sehingga tidak ada orang melebihi mereka dalam mempertahankan kemurnian darah mereka. Mereka sangat berhati-hati menjaga darah keturunan seperti kita menjaga kemurnian kuda pacu kita, karena sekali darah murni itu tercemar, tidak akan pernah

¹⁹ Christian Pelras, *Manusia Bugis*, (Jakarta: Forum Jakarta-Paris Ecole Francaise d'Extreme-Orient, 2016), hlm. 171.

²⁰ Abd. Latif, *Para Penguasa Ajatappareng Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 268.

bisa lagi dibersihkan dari noda, (...) Keistimewaan yang diperoleh dari darah bangsawan murni banyak jumlahnya dan penting artinya...” (Brooke, *Narrative*: 73,75).²¹

*Matoa*²² berperan sebagai penerus titah dan perintah dari pimpinannya kepada penduduk kampung. Di wilayah *Bori-bori* sering terjadi perselisihan maka mereka membentuk ikatan persahabatan atas dasar saling bantu-membantu yang mewujudkan satu persatuan dari beberapa *Bori* sebagai satu konfederasi. Konfederasi ini melahirkan suatu Dewan Hadat (*Hadatraad*) yang beranggotakan setiap pimpinan *Bori*. Perubahan konfederasi berkembang menjadi *Ke-Aru-an* setelah ditemukannya *Tu'manurung*²³, tokoh yang dipandang berasal dari kayangan atau orang yang turun dari langit. Dewan Hadat kemudian diubah menjadi Sembilan Panji (*Bate Salapang*), dengan tugas sebagai anggota dewan pemilih *Aru/Datu/Karaeng* dan tetap sebagai penguasa pada masing-masing wilayah kekuasaannya.²⁴

Dalam penyelenggaraan pemerintahan segala keputusan dan peraturan yang ditetapkan oleh *Aru/Datu/Karaeng* harus mendapat persetujuan dari dewan *Bate Salapang*. Pejabat-pejabat *Ke-Aru-an*²⁵ tinggi pada umumnya dijabat oleh bangsawan keturunan *Tu'manurung* dan merupakan kesayangan *Aru/Datu/Karaeng*. Dalam masyarakat Makassar dan Bugis dikenal dua kelompok

²¹ Christian Pelras, *op.cit.*, hlm. 193.

²² *Matoa* secara harfiah berarti yang dituakan atau dianggap tua. Walaupun jabatan ini tidak bergantung pada usia, akan tetapi lebih berpatokan pada kesanggupan, kemampuan dan pemahaman terhadap adat kebiasaan.

²³ *Tu'manurung* secara harfiah berarti orang yang turun dari langit.

²⁴ Edward L. Poelinggomang, *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 58-64.

²⁵ *Ke-Aru-an* merupakan wilayah kekuasaan seorang penguasa yang disebut *Aru*. A. Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo sebuah Kearifan Lokal Dalam Sistem Politik Tradisional Barru*, (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 33.

pelapisan sosial yaitu bangsawan (*Ana'karaeng*) dan orang merdeka (*Tu'maradeka*).²⁶

Kelompok bangsawan yaitu mereka yang memiliki kedudukan politik, sosial dan ekonomi lebih tinggi. Panggilan wakil rakyat setiap daerah yaitu *Ulu Anang* atau *Matoa* (Bugis), *Kasuwiang* (Makassar), *Tomakaka* (Mandar), *Tangke* (Duri) dan *Tomatua* (Enrekang). Benda-benda berupa senjata, bendera, piring porselen tua, dan lain-lain yang dipercaya mempunyai kesaktian yang dibawah oleh *Tu'manurung*, yaitu *arajang* (Bugis), *kalompoang* (Maksassar), *arajang* dan *anroso* (Luwu).

Kewibawaan pemimpin tergantung pula pada sistem nilai budaya *sirik*.²⁷ *Sirik* adalah sistem nilai budaya yang mengandung ajaran tentang perbedaan antara manusia dan binatang. *Sirik* dapat dimaknai dengan adanya harga diri, harkat dan martabat serta kehormatan kesusilaan yang melekat pada diri manusia. Mengajarkan moralitas kesusilaan berupa anjuran larangan, hak dan kewajiban yang menjadi pedoman hidup guna menjaga, mempertahankan serta meningkatkan harkat dan martabat manusia, kelompoknya dan menghormati martabat manusia.²⁸

Pada masa pemerintahan Puang Landek di Suqpi, yang merupakan cucu Puang Tamborok Langik dan keturunan Sawerigading (putra Datu Luwu La Tiuleng), bernama Puang Pagonggang (saudara Tomalangkek, *Aru* pertama Duri) memerangi para Ke-*Aru*-an atau *Lembang*, yaitu para kepala persekutuan adat Toraja. *Aru*-an *Patampulo* (40 orang *Aru*-an) berhasil dikalahkan dan ditaklukkannya, kecuali tiga Ke-*Aru*-an yang berhasil melarikan diri ke Barat, yaitu Ke-*Aru*-an Maiwa, Ke-*Aru*-an Kassa dan Ke-*Aru*-an Bungin, yang kemudian berfederasi dengan Duri dan Enrekang yang dinamakan *Massenrempulu*. Seperti halnya pemimpin di Bugis dan Makassar, *Aru* di *Massenrempulu* juga memegang

²⁶ *Ibid.*, hlm. 65-67.

²⁷ Zainal Abidin, *Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan*, (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1999), hlm. 100, 101 dan 103.

²⁸ *Ibid.*, hlm 201.

kekuasaan bersama dengan pemangku adat yang mempunyai gelar *Tomatua, Adek Puare, Tomakaka dan Sarang*.²⁹

Salah seorang *Aru* wanita yang bernama Embong Bulan, kemudian pindah ke Kaluppini (Enrekang) yang kawin dengan Palipada, *Aru* pertama di Enrekang. Seperti juga *Aru* pertama di Duri yaitu Palipada dan istrinya Embong Bulan yang dikisahkan sebagai *Tu'manurung*. Perjanjian *Ke-Aru-an* Palipada dengan orang-orang *Endekan* (dalam proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Dep. P dan K 1980/1981). Berkatalah salah seorang kepala persekutuan adat *Endekan* kepada Palipada, yang menurut cerita sebagai “orang yang turun dari langit” sebagai berikut:

Tinggallah Tuanku bersama kami di sini, kami ketiadaan pemimpin dan kami akan mempertuan Tuanku dan mengaku sebagai rakyat Tuanku, kami akan menyapa *Puang* kepadamu. Setiap perkataan yang Tuanku ucapkan kami akan buktikan dengan perbuatan. Payungilah kami agar kami tidak basah karena hujan dan tidak lekang oleh teriknya matahari, pimpinlah kami agar kami dapat bersatu tidak bercerai-berai dan selimutilah kami agar tidak kedinginan dan tetap hangat dalam selimut.

Menjawab Palipada (dengan persetujuan istrinya):

Kami berdua ini tak dapat tinggal dengan kalian dan memimpin kalian, sebab amatlah berat bagi kami berdua. Kalian mengharapkan agar kami menyelimuti kalian dalam kesatuan dan tidak cerai berai dan menyelimuti kalian agar tidak kedinginan. Hal ini tidak dapat kami lakukan. Selama kalian melanggar pantangan itu, janganlah harap kami akan tinggal disini, kecuali apabila kalian berjanji tidak akan melakukannya lagi.³⁰

Tomatua yaitu salah seorang persekutuan adat, berjanji akan mematuhi perintah Palipada dan tidak akan melanggar pantangan. Palipada menerima tawaran menjadi *Aru* dengan beberapa pantangan yang harus dipatuhi. Pantangan-pantangan tersebut (PDIKD 1980/1981 : 76-77), sebagai berikut: (a) Jangan sewenang-wenang

²⁹ *Ibid.*, hlm 118-119.

³⁰ *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Departemen Dalam Negeri Di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan*, (Ujung Pandang: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, 1991), hlm. 33.

mengambil hak atau milik orang lain, (b) Jangan menyimpan rasa dengki di dalam hati kalian, sehingga mencelakakan orang lain, (c) jangan iri hati jikalau orang lain memperoleh rezeki banyak, sedang engkau memperoleh sedikit, (d) jangan pikirkan yang bukan-bukan terhadap orang lain yang telah memperoleh rezeki banyak sedang engkau mendapat rezeki sedikit, (e) jangan engkau mengatakan sesuatu tidak ada padamu, padahal sebenarnya ada padamu, (f) berikanlah kepada mereka yang berhak kalau memang patut untuk diberikan, (g) jangan katakana tidak ada, padahal sebenarnya ada, (h) jangan tidur bersama dengan seorang perempuan yang tidak ada persetujuan orang tuanya, (i) jangan engkau merusak orang lain.

Daerah di Sulawesi Selatan terbagi dalam wilayah-wilayah yang dikuasai oleh para *Aru* atau *Karaeng* yang disebut *Akkarungeng* atau *Kekaraengang*.³¹ Besar kecilnya *Akkarungeng* pun tidak sama, ada yang meliputi beberapa *Wanua*, dua atau tiga *Wanua*. Selain itu pada kawasan tersebut juga dikenal dengan adanya *Apanase-apanase* yang disebut *Pamase* dan *Pabere*, yaitu sebidang tanah atau suatu wilayah yang diberikan pada orang-orang yang telah berjasa terhadap *Aru* atau *Karaeng*.³²

Pada tahun 1905 serangan militer yang disebut *Zuid Celebes Expeditie* dilancarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.³³ Penyerangan ke *Massenrempulu* serdadu Belanda menempatkan pasukannya di Maroangin dan Enrekang. Pada 14 Oktober pasukan Belanda yang dipimpin oleh Let. Kol Van Bennekom sudah mencapai Kalosi, kemudian bergabung dengan pasukan Belanda lainnya yang datang dari Rantepao yang dipimpin oleh Great Mayor de Wijd. Pasukan Belanda berkekuatan 6 *brigade* dengan jumlah serdadu 500 personil dengan persenjataan lengkap. Pasukan inilah yang kemudian mengalahkan para Ke-*Aru*-an di *Massenrempulu* seperti Ke-*Aru*-an Maiwa, Enrekang dan Duri. Perang tersebut

³¹ Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Patron dan Klien di Sulawesi Selatan Sebuah Kajian Fungsional-Struktural*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2007), hlm. 18.

³² *Ibid.*

³³ Abd. Latif, Nordin Hussin, *Sejarah dan Politik Kerajaan Bugis Kedinamikaan Konfederasi Ajatappareng di Sulawesi Selatan 1812-1906*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015), hlm. 276-281.

yang kemudian membawa para Ke-Aru-an di *Massenrempulu* harus menandatangani Pernyataan Pendek (*Korte Verklaring*) pada awal tahun 1909 di Pare-Pare.³⁴

Di *Massenrempulu* yang pertama menandatangani Pernyataan Pendek (*Korte Verklaring*) Ke-Aru-an Maiwa pada 27 Oktober 1905 (disetujui pada 19 Juli 1906). Pada 4 Maret 1906 diikuti Ke-Aru-an Enrekang (disetujui tanggal 19 Juli 1906), dan Duri menandatangani pada 11 Januari 1909 (disetujui tanggal 9 Juli, 1909).³⁵

Pada tahun 1906 Sulawesi Selatan seluruhnya telah berada dibawah kekuasaan langsung Pemerintah Hindia Belanda dan semua kekuatan politik lokal harus menandatangani Pernyataan Pendek (*Korte Verklaring*).³⁶ Pernyataan Pendek (*Korte Verklaring*) terdiri dari tiga pasal yang berbunyi, sebagai berikut: a) Bahwa penguasa pribumi yang bersangkutan mengaku takluk ke bawah Raja Belanda dan kerajaannya adalah suatu bagian dari Hindia Belanda, oleh sebab itu harus setia pada Raja Belanda dan wakilnya yaitu Gubernur Jenderal Hindia Belanda. b) Bahwa penguasa pribumi yang bersangkutan tidak akan mengadakan hubungan kenegaraan dengan kekuasaan-kekuasaan asing: musuh Belanda adalah musuhnya, sahabat Belanda adalah juga sahabatnya. c) Bahwa penguasa pribumi yang bersangkutan akan menaati segala peraturan mengenai negerinya, yang ditetapkan oleh Raja Belanda, maupun Gubernur Hindia Belanda atau wakilnya seterusnya akan menuruti segala perintah yang diberikan atau yang akan diberikan kepadanya oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda atau wakilnya.³⁷

Setelah dikeluarkannya Lembaran Negara (*Staatsblad*) 1910 No. 605 berlaku 1 Januari 1911. Susunan pemerintahan baru yang diajukan oleh

³⁴ Mohammad Natsir Sitonda. 2013, *op.cit.*, hlm. 8.

³⁵ G. A. Tideman, *op.cit.*, hlm. 6.

³⁶ Edward L. Poelinggomang, *Mozaik Sejarah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Pustaka Sawerigading, 2015), hlm. 48-49.

³⁷ Buapala, *Jejak Perjuangan Para Raja Tandung Mataranna Massenrmpulu Kabupaten Enrekang*, (Enrekang: Biritta Puang Tosang, 2013), hlm. 37-38.

Pemerintahan Hindia Belanda dalam penataan dan pelaksanaan pemerintahan Sulawesi Selatan dan daerah Bawahannya (*Gouvernement Celebes Onderhoorigheden*) diatur secara bertingkat ke bawah bagian pemerintahan (*Afdeeling*), cabang pemerintahan (*Onderafdeeling*), daerah adat (*Adatgemeenschap*) dan kampung (*Kampoeng*). Dalam tingkat bagian pemerintahan dan cabang pemerintahan berada di bawah pimpinan pejabat pemerintah Belanda, berurutan sebagai berikut, oleh pejabat Asisten Residen (*Assistant Resident*) dan Kontrolir (*Controleur*). Untuk tingkat daerah adat dan kampung berada di bawah pejabat pemerintahan bumiputra, yang dijabat oleh Regen (*Regent*) dan Kepala Kampung (*Hoofd*).

Asisten Residen (*Assistant Resident*) merupakan pemimpin pemerintahan di wilayah *Afdeeling*, bertanggung jawab terhadap segala hal pemerintahan di wilayahnya kepada Gubernur. Apabila terjadi perubahan struktur penataan pemerintahan, Asisten Residen bertanggung jawab Kepada Residen. Asisten Residen dibantu oleh seorang Aspiran Kontrolir (*Adspirant-Controleur*) dan seorang Juru Tulis. Asisten Residen membawahi beberapa Kontrolir (*Controleur*) yang masing-masing ditempatkan pada cabang pemerintahan (*Onderafdeeling*). Kontrolir sebagai pimpinan cabang pemerintahan menerima dan melaksanakan segala perintah, peraturan dan ketentuan yang dipercayakan kepadanya, bertanggung jawab kepada Asisten Residen.³⁸ Kontrolir dijabat oleh orang Belanda, bertindak sebagai pelaksana dan pengawas di tingkat pejabat bumiputera.³⁹ Pada setiap cabang pemerintahan dibagi lagi kedalam beberapa wilayah administrasi pemerintahan yang disebut Distrik (*Districten*). Di wilayah distrik inilah ditempatkan seorang pejabat pemerintahan bumiputra yang dipimpin oleh *Regent*.

Gelar *Regent* merupakan pejabat pemerintahan tertinggi bumiputra yang berhubungan langsung dengan pejabat Pemerintah Hindia Belanda. Menerima dan

³⁸ Edward L. Poelinggomang, *op.cit.*, hlm. 41-42.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

melaksanakan segala aturan, peraturan dan ketentuan pemerintah Hindia Belanda.⁴⁰ Kepala Kampung (*Hoofd*) merupakan wilayah pemerintahan terkecil bumiputera, berada di bawah pengawasan dan perintah *Regent*. *Regent* bertugas menjamin ketentraman dan keamanan, melaksanakan perintah dan peraturan yang diberikan kepadanya dan menjaga kebersihan kampung.⁴¹

Pada periode tersebut disebut dengan pemerintahan modern, setelah Pemerintah Hindia Belanda merubah struktur pemerintahan tradisional peran penguasa lokal sangat terbatas. Struktur pemerintahan setelah penandatanganan *Korte Verklaring* di *Massenrempulu* berada di bawah pemerintahan wilayah *Afdeeling* Pare-Pare, dengan cabang pemerintahan disebut *Onderafdeeling* Enrekang. *Onderafdeeling* Enrekang dipimpin oleh seorang pejabat pemerintahan Hindia Belanda dengan pangkat Kontrolir (*Controleur*). Lima wilayah *Landschap* dipimpin oleh *Aru* yaitu lima *Ke-Aru-an* yang tergabung dalam *Federasi Massenrempulu* yaitu *Ke-Aru-an* Endekan, *Ke-Aru-an* Maiwa, *Ke-Aru-an* Malua, *Ke-Aru-an* Alla dan *Ke-Aru-an* Buntu Batu.

Menurut Braam Morris, di wilayah *Landschap* itulah yang dijabat oleh pribumi dan semua tetap dijabat oleh *Aru* setempat. Pejabat pemerintahan terendah dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda adalah pembentukan distrik untuk wilayah-wilayah dalam *Ke-Aru-an*. Serta *Landschap* dibagi menjadi beberapa Distrik (*Districten*) yang dijabat Kepala Kampung oleh rakyat di wilayah tersebut.⁴²

Pemerintahan didasarkan pada Dewan Hadat di setiap *Landschap* sebagai aturan dari *Zelfbestuur* di Enrekang terdapat *Sulewatang* dan *Pabicara* yang dibantu oleh kepala terendah. Dewan Hadat (*hadatlid*) dibantu oleh 5 *Madika* yaitu *Madika* Papi, *Madika* Cendana, *Madika* Ranga, *Madika* Karueng dan *Madika*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 86.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 58-64.

⁴² Mohammad Natsir Sitonda. 2013, *op.cit.*, 8-10.

Bamba.⁴³ Di *Landschap* Duri, Malua dan Alla tidak memiliki *Sulewatang*. Misalnya Kontrolir (*Controleur*) Enrekang membawahi beberapa Distrik, Distrik Maiwa, Distrik Alla, Distrik Malua dan Distrik Buntu Batu.⁴⁴

Dewan Hadat (*hadatlid*) berfungsi sebagai pengadilan *Lili* (punggawa). Di Maiwa terdapat *Lili* Baringeng dan Bungin. Di Maluwa terdapat *Lili* Mangkugu, Tallutondok dan Banti. Di *Landschap* Alla terdapat *Lili* Baroko, di Buntu Batu terdapat *Lili* Palappo. Para penguasa dari *Landschap* dan *Lili*, pemerintah memasukkan jabatan *Aru*. Di *Landschap* Maiwa jabatan mereka sebagai Kepala Kampung atau *Matowa* dan *Tarata. Pabicara* dari Alla yaitu La Mangiro Nene Bolang, *Pabicara* dari Baroko yaitu La Gantoro Nene Linti.⁴⁵

Di masing-masing *Landschap* dikepalai oleh seorang pendeta yang disebut *Kalif*. Di *Landschap* Enrekang *Kalif* dibantu oleh seorang imam, empat *chatib*, empat *bilala*, *dodja* dan *santa*. Di *Landschap* Alla terdapat seorang *chatib*, seorang *bilala*, seorang *dodja* dan seorang *amili*. Terdapat pula wakil Dewan Hadat Pendeta yang ada di setiap *Landschap*, di *Landschap* Enrekang dan *Landschap* Duri gelar tersebut dipegang oleh anggota keluarga tertentu.⁴⁶ *Kalif* yaitu seseorang yang bisa membaca Al- Quran. *Kalif* selain bertugas sebagai penghulu dalam perkawinan, *Kalif* juga memimpin upacara perkawinan dan upacara kematian.⁴⁷

Menurut J.C. Scott (1972), kondisi sosial yang mendukung hubungan patron dan klien adalah adanya perbedaan kontrol atas kedudukan (status), kekuasaan, dan kekayaan. Perbedaan tersebut merupakan perwujudan dari sistem stratifikasi yang mendasari pertukaran vertikal. Dalam pandangan Pelres (1996) dan Ahimsa Putra

⁴³ Buapala, *op.cit.*, hlm. 24.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

⁴⁵ G. A. Tideman, *op.cit.*, hlm. 10.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 18 dan 27.

(1988), hubungan patron-klien adalah unsur kunci dalam masyarakat Sulawesi Selatan.⁴⁸

Menurut Mukhlis Paeni, bahwa kemampuan seorang patron memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan kliennya akan memperkuat ketergantungan dan ketaatan klien. Hal tersebut berkaitan dengan sifat sang patron yang menunjukkan kepemimpinannya, selanjutnya mengarah pada pengaruhnya di kalangan kliennya.⁴⁹

Menurut Le Rutte, kesetian para pengikut terhadap *Aru* atau *Karaeng* di Sulawesi Selatan sudah tidak diragukan lagi serta telah mendarah daging. Kesetian tersebut menimbulkan masalah bagi pihak Pemerintah Hindia Belanda ketika ingin memberlakukan sistem pemerintahan modern. Kedatangan Pemerintah Hindia Belanda yang ingin memberlakukan sistem pemerintahan baru, merupakan hal yang sangat ditentang oleh beberapa *Aru* atau *Karaeng*. Pemberlakuan sistem tersebut merupakan penghinaan bagi *Aru* atau *Karaeng*, karena ketika itu wilayah-wilayah sudah mulai ditetapkan batas-batasnya dan hanya satu orang kepala saja yang dianggap berkuasa secara sah di daerah bawahannya, yaitu mereka yang diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda yang diberi gelar *Regent*.⁵⁰

Aru atau *Karaeng* yang berkuasa sebelumnya di wilayah tersebut harus tunduk dan patuh dengan *Regent*. Ketaatan ini hanya di atas kertas saja, sedangkan dalam kenyataannya para *Aru* atau *Karaeng* lama masih tetap berpengaruh dan tetap dianggap pemimpin oleh masyarakatnya. Akibatnya sistem pemerintahan baru yang ingin diperlakukan Pemerintah Hindia Belanda tidak berjalan sesuai rencana.

Di wilayah-wilayah adat di Sulawesi Selatan sering dijumpai adanya kantong-kantong (*enclave*) penduduk merupakan suatu daerah yang dengan penduduk yang tidak tunduk pada kepala wilayah adat tersebut, tetapi tunduk kepada *Aru* atau *Karaeng* di wilayah lain. Kantong-kantong semacam ini ada

⁴⁸ A. Rasyid Asba, *op.cit.*, hlm. 49.

⁴⁹ G. A. Tideman, *loc.cit.*

⁵⁰ Heddy Shri Ahimsa-Putra, *op.cit.*, hlm. 19.

karena sebelumnya telah terjadi peperangan yang mengakibatkan beberapa daerah jatuh ke tangan *Aru* atau *Karaeng* lainnya, atau beberapa kampung kemudian diberikan sebagai hadiah.⁵¹

Sebagai contoh, di daerah Marusu kampung-kampung yang berada di wilayah lain tetap menjadi milik *Karaeng* Marusu disebut *to ri alena karaeng ri Marusu* (orang-orang yang termasuk anggota tubuh *Karaeng* Marusu). Ketika daerah di mana kampung-kampung tersebut jatuh ke tangan Pemerintah Hindia Belanda atau kampung-kampung tersebut akan dimerdekakan. Artinya lepas dari pengaruh *Karaeng* Marusu dan menjadi wilayah adat dari di mana kampung tersebut berada. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pengaturan dalam menerapkan sistem pemerintahan modern. Namun ternyata penduduk tidak bersedia dan tetap ingin mengikuti *Karaeng* Marusu (Spoor, 1925).⁵²

Apabila seorang *Aru* atau *Karaeng* berselisih dengan *Aru* atau *Karaeng* lainnya atau kerabatnya yang memiliki pengaruh yang lebih kuat, maka dia akan meninggalkan daerah kekuasaannya untuk menetap di tempat lain. Namun *Aru* atau *Karaeng* tidak sendiri kerabat-kerabat dekatnya, pengikutnya dan budak-budaknya beserta harta benda akan tetap mengikutinya kemanapun dia pergi. Di wilayah yang baru, kampung tempat *Aru* atau *Karaeng* ini tinggal merupakan daerah kekuasaannya dan pemerintahannya sendiri. Kepala-kepala daerah sebelumnya yang telah ada di wilayah tersebut tidak akan ikut campur dengan urusannya, meskipun kampung tersebut termasuk daerah mereka sebelumnya.⁵³

2.2. Kondisi Sosial Budaya *Massenrempulu*

2.2.1. Bahasa

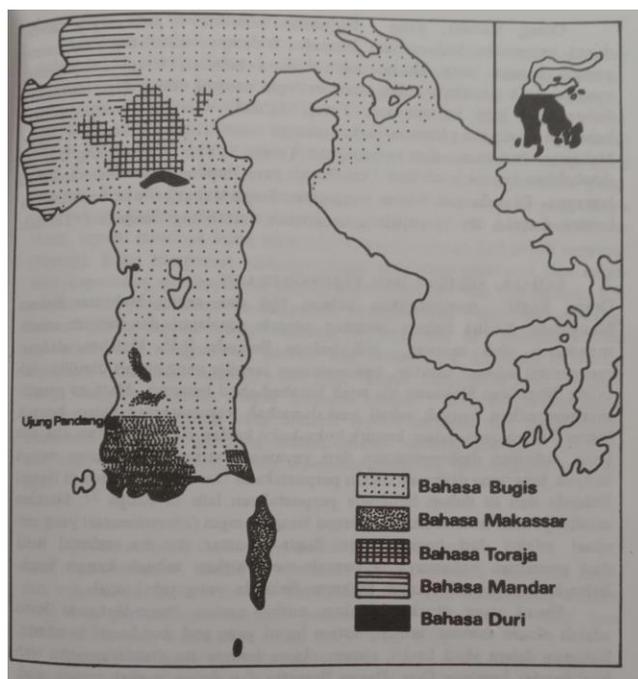
Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat *Massenrempulu* memiliki ciri khas tersendiri. Keunikan tersebut disebabkan karena rumpun *Massenrempulu* berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar, dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 18.

⁵² G. A. Tideman, *loc.cit.*

⁵³ *Ibid.*, hlm. 19.

digunakan di *Massenrempulu* secara umum terbagi atas 3 bahasa yang berbeda yaitu bahasa Duri, Enrekang, dan Maiwa.⁵⁴ Dr. H. van der Veen (*Afgevaardigde van het Nederlandsche Bijbelgenootschap te Rante-Pao*), telah menulis catatan mengenai batas-batas kelompok bahasa Sa'dang (kata *tae*) meliputi bahasa penduduk daerah hulu Sungai Sa'dang pada: a) *Onderafdeeling* Rantepao – Makale; b) Distrit Pantilang, Maindo, Kanna, Rante Bala di daerah aliran Sungai Jenemaeja (Lanskap Bua, *Onderafdeeling* Palopo); c) Distrit Bolong dan kawasan pegunungan Lanskap Walenrang; d) Desa Rante Limbung, Parombean, Sarang dan Maliba, di hulu Salo Maluwa Lanskap Alla, *Onderafdeeling* Enrekang; e) Desa Tangsa, Tauwe, Alla, Redak dan Mundan, Distrit Baroko, Lanskap Alla, *Onderafdeeling* Enrekang.⁵⁵



Peta. 2.2. Berikut Peta Bahasa-bahasa di Sulawesi Selatan.⁵⁶
(Sumber: Mattulada, 2010).

⁵⁴ Mohammad Natsir Sitonda. 2004, *op.cit.*, hlm. 5.

⁵⁵ J.A. Scheffelaar, *op.cit.*, hlm. 60.

⁵⁶ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2010), hlm. 267.

Menurut H van der Veen, bahwa dalam pembentukan kata dan kosa kata bahasa Sa'dang sepenuhnya mirip dengan bahasa Bugis, namun sebagian besar memiliki tipe tersendiri. Luwu memiliki kesamaan sifat dengan dialek *Massenrempulu*, itulah sebabnya H van der Veen memasukkan kedua bahasa tersebut dalam kelompok Luwu-*Massenrempulu*, yaitu kelompok perantara antara bahasa Sa'dang dan Bugis. Dialek-dialek yang digunakan di Lanskap Enrekang, Maiwa, Alla dan Buntu Batu di *Onderafdeeling* Enrekang dan Lanskap Batu-Lappa dan Kassa di *Onderafdeeling* Pinrang sama-sama termasuk dalam bahasa *Massenrempulu* atau sub-Toraja.⁵⁷

Kondisi geografi *Massenrempulu* yang memanjang dari batas Selatan Sidenreng Rappang hingga batas Utara Tanah Toraja, mengakibatkan penduduk yang mendiami wilayah tersebut memiliki perbedaan-perbedaan sosial budaya dalam masyarakatnya. Perbedaan yang paling menonjol adalah dialek bahasa yang digunakan sehari-hari. Daerah bagian Selatan yang berbatasan dengan Sidenreng Rappang, penduduknya menggunakan Bahasa Bugis sebagai bahasa sehari-hari. Namun, Bahasa Bugis yang digunakan mempunyai dialek yang agak kasar dibandingkan dengan Bahasa Bugis Bone yang halus (dalam Braam Morris, 1912). Jenis bahasa tersebut digunakan oleh penduduk *Zelfbestuur* Maiwa.

Dialek Endekan (Enrekang) atau bahasa yang dikenal dengan sebutan bahasa *Pattinjo*. Dialek tersebut digunakan oleh penduduk *Zelfbestuur* Enrekang, Papi, Jalikko, sampai pada perbatasan Pinrang seperti Benteng dan Letta (Braam Morris dalam Yunus Hafid, 1991/1992). Dialek bahasa Duri, secara umum digunakan oleh penduduk daerah *Zelfbestuur* Buntu Batu, Malua dan Alla. Secara dialektis penggunaan Bahasa Duri masih ada perbedaan-perbedaan.⁵⁸

2.2.2. Kepercayaan

Aspek budaya *Massenrempulu* juga mengenal ritual dan kebiasaan-kebiasaan yang dikenal dan dilaksanakan secara turun temurun dan kepercayaan bersumber

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 61.

⁵⁸ Mohammad Natsir Sitonda. 2004, *op.cit.*, hlm. 5.

dari ajaran Islam. Sebagian masyarakat masih percaya terhadap adanya makhluk halus dan roh-roh nenek moyang dan kepercayaan terhadap dunia ghaib (*real of the supernatural*). Kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang merupakan kepercayaan asli bagi seluruh bangsa Indonesia sebelum datangnya kepercayaan lain (Alisyahbana dalam Tihani, 1985).⁵⁹

Misalnya di Buntu Tangla, pemujaan terhadap Dewata Sewwae (dari kata Degaga watang artinya tidak ada kekuatan selain dia), dalam kegiatan yang disebut “*Mangnganta*”. Kegiatan ritual yang dipimpin oleh Sorong tersebut bertujuan untuk menghindari anak-anak kampung dari penyakit dan marabahaya. Paham tentang Dewata Sewwae kemudian dimaknai dengan Tuhan/Allah yang Maha Esa, mereka menyebutnya dengan istilah Puang Allah Taala. Menurut kepercayaan masyarakat setempat tempat bersemayam dewata seperti di pohon-pohon besar, gua, batu besar, sungai dan tempat lain yang dianggap keramat. Terhadap tempat keramat dilakukan persembahan sesajen yang disebut *Mangmacani-cani*, yaitu sesajen yang terdiri atas makanan manis-manis, seperti gula, ballo/arak, pisang, tebu dan lain-lain. Pada pohon-pohon besar atau gua sesajen dapat berupa daun sirih, nasi ketan (*sokko*), daging ayam, ballo/arak yang disertai dengan pembakaran kemenyan/dupa.

Di sebagian masyarakat *Massenrempulu* mengenal Dewata yang bertugas mengatur manusia dan alam yaitu Dewata Lattu dan Batara Guru. Batara Lattu bertugas mengantarkan Dewata Sewwae kepada manusia untuk memberikan sesuatu, baik berupa keuntungan maupun berupa kegagalan, memberikan petunjuk gaib kepada manusia berupa *were* (ilham). Selain itu bertugas melaporkan segala permohonan manusia kepada Dewata Sawwae dan mengontrol roh-roh manusia yang sudah mati untuk melakukan seleksi di perbatasan langit ketujuh, menentukan roh-roh yang dapat diterima masuk surga dan roh-roh yang kembali ke dunia. Berdasarkan kepercayaan tersebut sehingga sebagian masyarakat meyakini ada roh-roh jahat dan baik. Batara Lattu diidentikkan dengan Malaikat Jibril. Dewata Sawwae yang bertugas memberikan petunjuk berupa ajakan kepada manusia yaitu

⁵⁹ Mohammad Natsir Sitonda, *Sejarah Massenrempulu Jilid I*, (Makassar: Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir, 2012), hlm. 3

Batara Guru. Ia mengajarkan tata cara yang harus dilakukan manusia sehingga setelah meninggal rohnya diterima dan masuk surga. Batara Guru yang bertugas memberikan keselamatan diidentikkan dengan Nabi Muhammad (Tihami, 1985).⁶⁰

Mereka kepercayaan terhadap adanya setan (*setang*) dan setan yang berasal dari manusia. Setan yang mengganggu ketentraman hidup manusia, yaitu seperti *Indo Cocoli*, *Puang Maruru*, dan *Kamandang*. *Indo Cocoli* adalah setan yang bersemayam di hutan dan gunung, mengganggu manusia saat panen. Masyarakat mempercayai adanya setan tersebut mengambil hasil panen seperti padi ketika hasil panen kurang. *Puang Maruru* (setan lurus) merupakan sapaan untuk setan tersebut agar tidak menyebarkan wabah penyakit. *Puang Maruru* adalah makhluk halus yang dipercaya menyebar penyakit cacar, biasanya anak-anak yang menjadi sasarannya. Tetapi penyakit tersebut dapat disembuhkan dengan perantara *Sorong/Sandro* yang menggunakan mantra. *Kamandang* adalah makhluk halus yang mendiami bagian sungai yang dalam, memangsa manusia dengan menjelma semacam tikar atau air berputar dengan menggulung mangsanya ke dalam air dan tidak muncul lagi.

Mahluk halus lain yang tidak kalah menyeramkan yang berasal dari manusia yaitu yang dikenal dengan *Poppo*, *Parakang* dan *Passulo Tokko*. Makhluk tersebut berasal dari manusia yang mempelajari ilmu-ilmu ghaib untuk memperoleh kekayaan, kewibawaan dan keistimewaan lainnya. Mereka berubah menjadi *Poppo*, *Parakang* dan *Passulo Tokko* karena salah dalam menerima dan menerapkan ilmu magis tersebut. Mereka berjalan pada malam hari dengan meninggalkan jasadnya dan lidah menjulur keluar siap menerkam mangsanya. Namun masyarakat setempat memiliki penangkal untuk makhluk halus tersebut seperti menanam pohon jarak/tangla di depan rumah dan membawa besi (parang/pisau) ketika keluar rumah pada malam hari.⁶¹

Pakaian di Duri tidak diatur secara jelas, namun untuk *Aru*, Kepala Hadat dan Kepala Kampung mengenakan pakaian lengan panjang. *Aru* Alla, Maluwa dan

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 4-5.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 6-7.

Buntu Batu berhak memakai lima kancing emas di baju mereka, *Aru Lili* tiga kancing. Kepala Hadat dan pimpinan lainnya juga memakai tiga kancing emas setelah mendapat persetujuan dari *Aru*.⁶²

Di Lanskap Enrekang dan Maiwa adat istiadat Bugis dipatuhi dalam ritual kelahiran, perkawinan, pemakaman, dan lain-lain. Beda halnya di Duri seperti yang tentang adat istiadat yang dianut:

A. Kelahiran

Ketika seorang anak dari *Zelfbestuur* Duri lahir, 3 lembar daun terlebih dahulu dikeluarkan dari "*Kalobe*" (labu) dan anak yang dilahirkan setelahnya ditempatkan di atasnya. Tali pusar kemudian dipotong dengan tali bambu tajam setelah diikat. Ari-ari harus dikuburkan di kampung tempat tinggal *Aru*, sekalipun ibunya tinggal di kampung lain. Ini harus dilakukan sebelum jam 12 siang, jika tidak anak akan sering menangis. Ari-ari dikuburkan oleh (sebaiknya dua) laki-laki. Setelah selesai mereka langsung kembali ke rumah tempat kelahiran berlangsung tanpa berbicara. Orang yang menguburkan ari-ari itu pergi ke tempat dimana anak itu dilahirkan, menggendongnya, membungkus dirinya dan anak itu dengan sarungnya, kemudian pergi tidur dengannya. (Sementara itu, sang ibu telah dibawa ke tempat lain di rumah).⁶³

Beberapa saat kemudian dia terbangun dengan kata-kata: "*Mitjo'ko, madjaomi allo*". (bangun, matahari sudah tinggi). Jika anak tersebut perempuan, mereka berkata: "*Maleko Rumido*". Pria tersebut kemudian bangun bersama anak tersebut, namun segera kembali tidur. Hal ini diulang hingga 3 kali. Semua itu dilakukan agar anak tidak menjadi malas. Kemudian seseorang di dalam rumah itu berteriak dengan suara nyaring bahwa istri telah melahirkan seorang putra atau putri. Orang lain yang berdiri di bawah rumah mengambil alih dan meneriakkannya dengan keras hingga terdengar di kampung. Kampung tetangga mengambil alih dan begitu seterusnya hingga diumumkan di semua kampung.

⁶² Tideman, *op.cit.*, hlm. 22 dan 23.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 14.

Pada saat tali pusar telah jatuh, millet dengan susu kerbau direbus di rumah orang tua, yang makanannya dikonsumsi oleh laki-laki yang menguburkan ari-ari dan semua yang membantu perempuan dalam persalinannya. Makanan ini disajikan dalam 8 piring. Makanan ini dikonsumsi oleh orang yang sama selama 3 hari dan 3 kali sehari. Inilah yang disebut dengan “*Mappanawah*”. Setelah 8 hari, diadakan acara yang disebut “*padalih*”, nasi dimasak yang dicampur dengan semua sayuran dan buah-buahan yang dihasilkan tanah pada saat itu, dan telur, kecuali jagung. Makanan ini dibagi lagi menjadi 8 porsi dan ditambahkan 1 atau 8 butir telur pada setiap porsinya. Porsi tersebut juga dikonsumsi oleh orang yang sama selama 3 hari, namun hanya 1 kali dalam sehari. Tiga hari setelah waktu makan terakhir, sang ibu dibawa ke sebuah sumur dan dimandikan di sana. Ini disebut “*masombo boewoen*” (melihat sumur). *Masombo* = lihat, *boewoen* = sumur.⁶⁴

B. Pernikahan

Cara pelaksanaan perkawinan di Enrekang dan Maiwa seluruhnya didasarkan pada Adat Bugis. Berbeda dengan adat istiadat di Duri yang akan dijelaskan di bawah ini. Perkawinan antar kelas sosial yang bisa atau tidak dilaksanakan, jika seorang *anak cera* laki-laki hendak mengawini *anak-rajing* perempuan, maka tidak perlu membayarkan keris atau emas dengan uang 80 matawang, tetapi perkawinan itu dapat dilakukan atas persetujuan bersama kedua orang tuanya. Namun, jika laki-laki tersebut madika atau ata, ia tidak boleh menikah dengan wanita berdarah bangsawan, baik murni maupun campuran. Keturunan laki-laki dari anggota Hadat (*Sulewatang* dan *Pabicara*) juga tidak diperbolehkan menikah dengan keturunan bangsawan perempuan (yang berdarah murni atau campuran), namun keturunan perempuan dari anggota Hadat diperbolehkan menikah dengan keturunan kerajaan laki-laki. Keturunan anggota Hadat boleh menikah dengan madika, namun atas izin *Aru* diperlukan bagi perempuan keturunan anggota Hadat.⁶⁵

⁶⁴ J.A. Scheffelaar, *op.cit*, hlm. 32.

⁶⁵ J.A. Scheffelaar, *loc.cit*.

Ketika seorang pemuda di Duri ingin mengawini seorang gadis, atau yang lebih umum, jika seorang ayah ingin mengawinkan anaknya, maka ia akan mengirimkan salah satu kerabatnya atau temannya, seperti *Suruan*, kepada ayah gadis tersebut. *Suruan* ini juga mengambil sebungkus daun sirih dan pinang serta sebotol kendi *tuak*. Jika ini diterima, itu akan menjadi bukti persetujuan. Kedua orang tua kemudian mengumpulkan seluruh anggota keluarga dan mengumumkan rencana pernikahan. Pernikahan harus segera dilaksanakan dalam waktu satu bulan pada hari yang telah ditentukan oleh ayah dari pengantin wanita. Tujuh atau tiga hari sebelum hari pernikahan pihak laki-laki harus membawa kepada ayah perempuan *Panai* dan sebuah cincin emas untuk ibu dari pengantin perempuan disebut *pabbaja lalan* (membuka jalan). Tiga hari sebelum pernikahan pengantin laki-laki mengirimkan sekeranjang beras dan beberapa ekor ayam untuk calon istrinya. Sehari sebelum acara dimulai, pengantin laki-laki dalam prosesi dibawah ke rumah pengantin perempuan. Beberapa orang di depan membawahi beberapa kendi *tuak*. Seorang laki-laki membawahi keranjang beras yang berisi beberapa lembar daun sirih, tujuh buah pinang, pisau padi, sebuah kemiri, jarum dan penggorengan, semua dikemas dalam sepotong kain putih.⁶⁶

Pada hari pernikahan, laki-laki bersama keluarganya dan *Kade* atau *Guru* (seseorang yang bisa membaca Al-Quran) ke rumah calon mempelai wanita dan pernikahan dilangsungkan. Setelah makan malam dan acara pernikahan selesai, sebagian besar keluarga suami kembali ke rumahnya. Pasangan muda itu tinggal di rumah wanita itu selama 3 hari. Setelah 3 hari, seluruh keluarga sang suami kembali membawa pasangan tersebut ke rumahnya sendiri disebut *disombo* (*Sombo* = kejutan). Pada saat itu semua orang mengambil sepotong ketan rebus dengan sepotong keju kerbau (*dangke*) dan memberikannya kepada ibu dari wanita muda yang sudah menikah, sambil berkata: "*Tammoei mati appomoe*", yang artinya "sambut cucu mu". Sekali lagi makan bersama dilakukan bersama dan kemudian pasangan suami istri diantar ke rumah masing-masing. Di kalangan masyarakat miskin, kadang-kadang terjadi jika seorang pemuda dan pemudi sepakat, mereka

⁶⁶ Tideman, *op.cit.*, hlm. 18-19.

akan hidup bersama tanpa formalitas apa pun dan menganggap diri mereka sudah menikah. Kemungkinan perceraian juga akan terjadi tanpa campur tangan pihak ketiga.⁶⁷

Pada pernikahan kerajaan dibutuhkan lebih banyak proses dalam pernikahan, misalnya *Aru Alla* ingin meminta putri *zelfbestuur* lain untuk menikahi anaknya, ia mengirim *pabicara* untuk bertemu dengan ayah gadis itu. Apabila *pabicara* tidak keberatan, kemudian dua pejabat pergi untuk bertemu ayah dari gadis itu dan begitu juga dalam hal ini tidak keberatan untuk menikah, *pabicara* Alla kembali ke tuannya untuk menyampaikan hasil pertemuannya. Jika, *pabicara* dari ayah gadis: memiliki keberatan, ia wajib mengatakan, maka kedua ras *pabicara* juga pergi sebelum *Aru* untuk mengatur *Pabicara* Alla kesempatan untuk menyanggah keberatan yang diajukan atau janji, bahwa mereka akan dibawa pergi dengan syarat bahwa, jika hal ini tidak dilakukan secara menyeluruh dan kemudian harus membuktikannya akan segera mengikuti perceraian. Berbeda halnya ketika ayah gadis setuju atas pernikahan, maka *pabicara* Alla kembali untuk melaporkan apa yang telah terjadi.

Aru yang akan melakukan lamaran menyiapkan beberapa daun sirih, pinang dan tembakau dikemas dalam sepotong kulit kayu dari batang pinang (*locpang*), dibungkus sebagian dalam kain putih. Semua ini dibawa dengan kendi *tuak* untuk ayah dari gadis itu. Prosesi adat ini dilaksanakan oleh orang-orang dari kampung Cellak. Sekarang ini hidup atau menyebar ke desa-desa lain, tetapi diketahui persis siapa orang-orang Cellak ini. Sepuluh hari setelah itu, *zelfbestuur* dari Alla membawahi lagi daun sirih dan kendi *tuak*, tapi sekarang dibungkus daun pisang dengan pinang dikemas secara terpisah oleh orang-orang dari Cellak membawa ayah calon mempelai. Orang Cellak kemudian berdiri di hadapan ayah calon mempelai perempuan dan meminta putrinya apakah dia setuju dalam pernikahan?. Jika mereka menolak, orang-orang Cellak akan kembali ke Alla dengan membawa daun sirih mereka. Jika dia setuju hadiah yang dibawah itu akan diambil.

⁶⁷ J.A. Scheffelaar, *op.cit*, hlm. 34.

Pernikahan harus dilakukan dalam waktu satu bulan, pada hari yang akan ditentukan oleh ayah dari pengantin wanita. Tiga atau tujuh hari sebelum hari yang ditentukan pranikah *arung* Alla membawa kepada ayah dari pengantin *panai* (kelewang tanpa ornamen emas atau perak) dan sebuah cincin emas untuk ibu dari pengantin wanita. Ini disebut *pambaja lalan* (membuka jalan). Kedua benda harus dibawa oleh keturunan *pabicara* dari Barakka, kampung Buntu Batu. Ini bukan fungsi anggota Hadat tapi bergabung dalam upacara sebagai semacam pemimpin upacara. Sehari sebelum upacara pernikahan dilangsungkan, pengantin pria dalam prosesi dibawah ke rumah pengantin wanita. Beberapa orang dari kampung Barang pergi ke depan dengan beberapa kendi tuak. Kemudian seorang pria dengan keranjang beras, yang berisi beberapa paket daun sirih, tujuh buah pinang, pisau beras, sebuah kemiri, jarum dan sepotong penggorengan, semua dikemas bersama-sama dalam sepotong kain putih.

Pengantin pria dilengkapi beberapa Barangers dalam upacara (barangan – tombak dengan rambut kuda) dan senapan bersenjata. Prosesi ditutup oleh *pabicara* dan *kalif*, diikuti oleh keluarga. *Aru Alla* sendiri tinggal di rumah. Setelah tiba di rumah ayah dari pengantin wanita, pernikahan dilakukan oleh *kalif* sedangkan pengantin wanita di ruangan yang terpisah. Setelah penyempurnaan pernikahan pengantin dibawa bersama-sama, dan kembali ke ruang tamu.

Pada hari ketiga setelah upacara, orang tua dari suami memotong ayam dan dipanggang (kepala dan kaki tidak boleh dipotong). Piring dengan beberapa nasi yang dibungkus dalam tiga kain putih (*dodo talloe*) perempuan Alla dan keluarga suami (yang juga demikian menambahkan orang tuanya) ke rumah orang tua dari pengantin wanita. Mereka kembali ke Alla bergabung dengan pengantin baru untuk pergi ke rumah mereka di Alla.⁶⁸

C. Perceraian

Pasangan suami istri yang ingin bercerai harus mengajukan permohonan kepada kepala kampung, selanjutnya para kepala kampung asal kedua pasangan membentuk Dewan Tetua. Ketika dalam proses perceraian melalui para kepala

⁶⁸ Tideman, *op.cit.*, hlm. 17-19.

kampung tidak ada titik temu, maka Dewan Tetua mengajukan banding kepada Hadat. Pada proses perceraian terdapat beberapa persoalan sebagai berikut: pembagian harta, jika tidak memiliki anak, maka barang akan dibagi antara suami dan istri. Jika pasangan telah memiliki anak, maka anak berhak atas barang yang dimiliki orang tua. Bila perempuan yang mengajukan cerai, maka semua pemberian dari laki-laki dapat diambil kembali, tetapi hal demikian tidak diperbolehkan jika permintaan cerai datang dari pihak laki-laki.⁶⁹

Kasus berbeda, ketika seorang perempuan telah menerima lamaran dan dia menerima lamaran dari pria lain. Mereka juga percaya bahwa suami pertama dapat mengajukan keberatan kepada Hadat, bahwa pasangan itu dapat diberikan denda dua ekor kerbau hitam, satu ekor dari perempuan dan satu ekor dari laki-laki. Kerbau ini diberikan kepada suami pertama disebut dengan *sulebaine* (menggantikan istri).⁷⁰

Aturan perceraian dari kalangan bangsawan di Duri pun berbeda. Pihak laki-laki ketika ingin bercerai, maka ia akan membawah kembali istri kepada orang tuanya dan berkata bahwa ia tidak mengakui lagi dia (perempuan) sebagai istrinya. Demikian itu persoalan selesai. Berbeda ketika pihak perempuan yang ingin bercerai, dia kembali sendiri kepada orang tuanya dan menyampaikan alasan apa yang membuat dia meninggalkan suaminya. Dia kemudian mengirimkan sarung putih, jaket putih, celana panjang putih dan jilbab putih. Apabila pria memakai pakaian tersebut, maka perceraian telah sah. Jika pria tersebut menolak untuk mengambil benda-benda ini, maka masalah akan diselidiki oleh Kepala Hadat kedua *lanskap*, barang milik pasangan diperiksa dan diambil keputusan. Jika wanita tidak berhasil mengajukan perceraian, dia akan diwajibkan untuk kembali ke suaminya. Hasil keputusan yang membuat perceraian terjadi, dan pihak pria

⁶⁹ J.A. Scheffelaar, *op.cit*, hlm. 35.

⁷⁰ Tideman, *loc.cit*.

tidak puas dengan keputusan anggota Hadat, maka terkadang terjadi perang antara kedua *lanskap*.⁷¹

D. Adopsi

Ketika pasangan tanpa anak ingin mengangkat seorang anak dan telah menemukan orang tua yang bersedia menyerahkan anaknya. Kesepakatan telah tercapai, sidang diselenggarakan oleh Kepala Kampung dihadiri Dewan Tetua, orang tua anak dan pasangan yang akan mengadopsi. Dilakukan penyembelihan seekor ayam, dan dinyatakan bahwa anak tersebut telah diangkat oleh orang tua yang baru, dan mempunyai hak yang sama terhadap mereka seperti anak kandungnya. Apabila orang tua angkat tidak mempunyai hubungan darah, maka anak angkat mempunyai hak-hak yang sama dengan anak kandungnya, tetapi hak-hak antara orang tua kandung dan anak tetap ada, meskipun telah dilakukan pengangkatan anak.⁷²

E. Pemakaman

Pada kematian, adat istiadat khusus yang dianut di Duri yang tidak ditemukan di Enrekang dan Maiwa. Rangkaian upacara kematian yaitu pertama-tama jenazah dimandikan disebut "*dijio salah*", lalu membungkus dengan kain putih (*dibalun*). Seekor ayam kemudian disembelih (tidak dibersihkan) dan digantung di pintu rumah selama 3 hari disebut "*karoondoean*". Tujuan dari ini adalah bahwa jiwa hewan disembelih akan mengikuti perjalanan almarhum ke tempat-tempat yang tidak diketahui. Pada hari yang sama dibuat "*kalongbassih*" (bingkai kayu) dianyam, ditutup dengan tiga kain putih (*dodo talloe*) dan ditempelkan di atas jenazah.⁷³

Pada hari ketiga setelah kematian, mayat dimandikan lagi yang disebut *papak*, yang jumlahnya tergantung pada kekayaan almarhum. *Papak* disebutkan *sampapak*, terdiri dari tiga bagian kain putih dipotong sepanjang tubuh, dua

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 19-20.

⁷² J.A. Scheffelaar, *op.cit*, hlm. 35-36.

⁷³ J.A. Scheffelaar, *loc.cit*.

diantaranya saling berdampingan dan yang ketiga diletakkan di tengah (*bidang*). Untuk orang biasa adalah 5, untuk orang kaya 7 dan 9 *papak* untuk yang lebih kaya. Dari bentangan bidang yang tersisa anggota keluarga mengambil potongan kain sepanjang tubuh jenazah dan dilingkarkan diatasi kepala. Ini disebut "*mapote*", dianggap sebagai tanda berkabung. Jika jenazah dibungkus dengan 5 *papak*, dalam 7 *papak* adalah 2 dan 9 *papak* disembelih tiga ekor kerbau. Penyembelihan kerbau ini disebut *tekkin lece* (tongkat kecil). Dia yang mengantar ke kuburan mendapat, kaki belakang; ketika dua ekor kerbau disembelih, upahnya bagian kaki belakang dan punggung dan dari tiga kerbau dia menerima setengahnya kerbau.⁷⁴

Jenazah didoakan oleh beberapa orang, selanjutnya dibawa ke *kalongbassi* dibawah turun dan ditempatkan dalam peti mati. Sementara itu disiapkan makanan telur rebus, dimakan oleh orang-orang yang telah berdoa. Jenazah didalam *kalongbassi* ditempatkan pada peti mati dan membawanya dengan tandu ke liang kubur. Pada saat pemakanan telah selesai, maka *kalongbassi* ditempatkan di samping kuburan, untuk mencegah tuntutan lebih banyak orang. Segera setelah pemakaman dimakan daging kerbau yang telah disembelih. Pada malam harinya, disembelih seekor kambing dan tiga ayam, yang disebut *randukan bongi* (awal malam).⁷⁵

Upacara selanjutnya adalah *Me-ollong* atau keluarga mengunjungi makam. Waktu kunjungan tergantung pada jumlah papak yang membungkus jenazah tersebut. Jumlah 5 *papak*, *meollong* terjadi setelah 5 hari, dengan 7 *papak* setelah 7 hari, dan dengan 9 *papak* setelah 9 hari. Sebelum mengunjungi makam, seekor ayam disembelih setiap malam dan nasi dimasak untuk almarhum. Salah satu orang yang berdoa mencicipi sebagiannya dan sisanya dibagikan.⁷⁶ Pada hari ke 29 setelah kematian, keluarga beserta Khalif bersama beberapa orang yang bisa membaca Al-

⁷⁴ Tideman, *op.cit.*, hlm. 21.

⁷⁵ J.A. Scheffelaar, *op.cit.*, hlm. 37.

⁷⁶ Tideman, *loc.cit.*

Quran. Di kuburan Khalif membacakan doa (*bang – azan*); “*Allahu Akbar*” (3 kali) “*Ashadu laila ha illala*” 3 kali “*Ashaduanna Muhammadanra Sululla*” (3 kali) “*Haiya alafala*” (3 kali) “*Hayya alalfala*” (3 kali). Hal ini bertujuan untuk mengingatkan roh-roh yang telah meninggal bahwa orang yang telah meninggal tersebut adalah seorang Muslim.⁷⁷

Sehari sebelum kunjungan, dilakukan penyembelihan seekor kambing yang disebut “*bongi tampak*” (malam terakhir). Ini dimakan oleh keluarga. Pada hari ziarah kubur juga dilakukan penyembelihan seekor kambing yang disebut “*kapoelongan*” (berziarah). Kambing ini wajib dimakan oleh keluarga sebelum berkunjung. Setelah hal ini terjadi, orang-orang pergi ke kuburan untuk meletakkan batu di sekitarnya, yang disebut “*bala batu*”. Pada malam hari keenam, kambing lain disembelih disebut *mapitu* (malam sebelum hari ketujuh setelah pemakaman). Ini diulang 5, 7 atau 9 kali, tergantung pada jumlah *papak*, yang digunakan untuk membungkus jenazah. Dalam beberapa kali, ada seekor kambing disembelih, disebut *kandean bobo* (makan nasi⁷⁸).

Upacara adat yang terakhir “*pantuan*” (festival penyembelihan), dilaksanakan pada hari kesepuluh setelah *kandean bobo*, sesuai dengan ukuran jumlah *papak* yang digunakan, 2, 8 atau 12 kerbau. Apabila tidak tersedia cukup kerbau, maka ditunggu sampai ada, untuk menghormati keluarga sendiri, maka seekor kerbau bisa diganti kambing untuk disembelih. Kemungkinan bagi mereka ada yang tidak mampu menyediakan jumlah kerbau yang diperlukan untuk *patunuan*, bisa hewan lainnya disembelih, tetapi masih dalam jumlah kerbau yang telah ditentukan sebagai syarat untuk acara kematian. Pemerintah tersebut mencoba menyangkal penyembelihan yang sering dilakukan, sehingga membuat penduduk sering meminjam untuk memenuhi upacara adat kematian.⁷⁹

⁷⁷ J.A. Scheffelaar, *op.cit.*, hlm. 47.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 38.

⁷⁹ Tideman, *op.cit.*, hlm. 22.

Contoh kasus di *Zelfbestuur* Duri, pada hari *pantunuan* harus disembelih sebanyak 45 ekor kerbau. Ini disediakan oleh saudara sedarah; penerus memberi 4 kerbau, *Aru* dari dua *lanskap* lainnya harus ada di *pantunuan*. Para Ke-*Aru*-an tetangga seperti Enrekang, Toraja dan lainnya, mereka juga bisa membawa kerbau. Kepala dan salah satu kaki kerbau yang akan disembelih diletakkan kembali di atas pandang dan dagingnya dikonsumsi oleh yang hadir. Keesokan harinya kepala dan kakinya diturunkan lagi dan dibagi seperti pada *mabatang*, namun kini anggota keluarga juga mendapat bagiannya. Makanan diberikan kepada para kepala *Zelfbestuur*, semua kepala hadat dan penjaga hiasan dari almarhum. Prosesi menikmati hidangan telah selesai, selanjutnya *pabitjara* memanjat pandang dan berkata: *Mapperangikotau* (nama penerus) *poampah, pobaju-baju, ke napotuwo I. petjok, na-peta roeki ambong, lalanna tallun tahun, malute, I. Ian, ke tanaparuki ambong tana potuwo I petjok malele I lako, sang indona*". Artinya: *Mapperangikotau* (nama penerus) duduk di tikar, mengenakan jaketnya; jika panen berhasil orang-orang dan hewannya tetap sejahtera dihidupi raja selama tiga tahun; tetapi jika panen gagal, orang-orang dan hewan tidak dihidupi raja, kemudian menggantikan saudaranya".⁸⁰

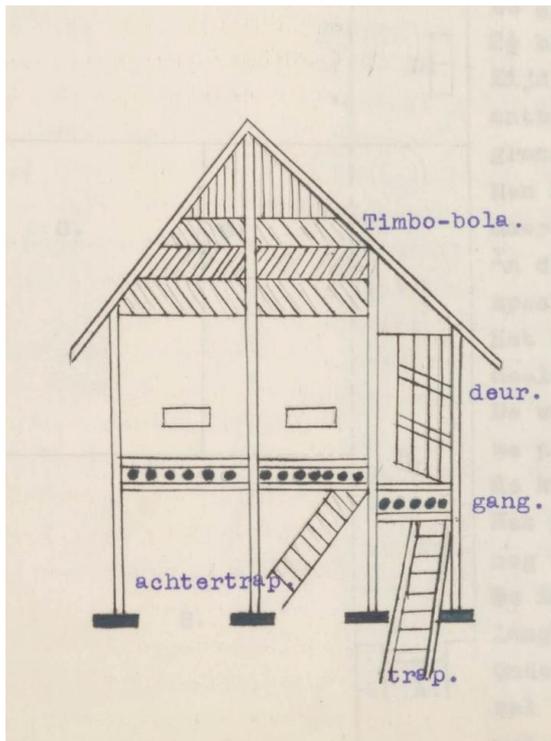
F. Rumah

Ritual mendirikan rumah disebut *ma'barasanji*, membaca kitab Al Barasanji (sebuah kitab puisi Arab yang berisi pujian kepada Nabi Muhammad SAW). Tujuan *ma'barasanji* adalah untuk menghindari bahaya dan mendatangkan keselamatan bagi pemilik/penghuni rumah. Hal yang dengan diperhatikan yaitu penetapan arah hadap rumah, penetapan waktu memulai, sesajen berupa buah-buahan yang manis bahkan memulai pembangunan dengan memotong hewan oleh Imam.⁸¹ Pada umumnya rumah yang berada di Enrekang yaitu rumah panggung dengan bahan kayu, bambu dan daun pandan sebagai atap rumah. Lantai rumah terbuat dari bambu bilah yang disusun dengan jarak tertentu. Hanya tempat-tempat utama saja yang

⁸⁰ J.A. Scheffelaar, *op.cit.*, hlm. 49.

⁸¹ Mohammad Natsir Sitonda. 2012, *op.cit.*, hlm. 8-9.

merupakan rumah batu. Untuk kamar tidur dibuat alas dengan tikar. Dalam rumah penduduk kebanyakan membuat *loteng* untuk penyimpanan jagung. *Timbo bula* merupakan tempat diluinya hujan antara atap depan dan belakang menuju penampungan air. Kebiasaan penduduk membuat rumah menghadap ke Utara atau Selatan.⁸²



Keterangan

Deur : Pintu

Gang : Lorong

Achtertrap : Tangga Belakang

Trap : Tangga

Gambar. 2.1. Desain Rumah Tradisional di *Onderafdeeling* Enrekang. (Sumber: G. A. Tideman, 1933), Nationaal Archief.

G. Agama

Mayoritas penduduk di *Onderafdeeling* Enrekang beragama Islam atau Muhammad (*Mohammedaansche*). J.A. Scheffelaar melakukan perjalanan dari utara ke selatan, dalam berjalannya dia memberikan gambaran bahwa di Duri hanya beberapa tempat yang menunjukkan jejak agama Islam, seperti di bagian utara Alla dan Baroko. Daerah yang langsung berbatasan dengan Makale merupakan penganut Agama Islam, tetapi hanya terlihat dengan tidak memakan babi, mereka tetap menjalankan perayaan kematian. Di wilayah bagian selatan seperti *Zelfbestuur*

⁸² G. A. Tideman, *op,cit.*, hlm. 7-8.

Enrekang, dia menemukan masjid-masjid di Kampung Langkaras yang tampak memprihatinkan.

Di masing-masing dari 5 Wilayah *Zelfbestuur* di Enrekang, pendeta dipimpin oleh seorang Kalif. Di Enrekang dibantu oleh seorang Imam, Chatib, Bilal, dan Doja atau Santa. di Maiwa oleh Amilin, Chatib, Bilal dan Doja. Di Alla melalui seorang Chatib, Bilala dan Amillih. Di Maluwa oleh seorang Chatib, Bilala, Doja dan Amillih. Amillih adalah perwakilan Hadat di dewan imam yang ada di setiap negara. Di Enrekang dan Maiwa urusan hukum perkawinan dan waris dibawa ke hadapan “sara” (syarat) dan diselesaikan, di Alla “sara” hanya mempunyai suara penasehat dalam urusan hukum perkawinan dan waris. Di *lanskap* Enrekang dan *lanskap* Duri, hubungan spiritual tersebut dipegang oleh anggota keluarga tertentu. Apabila sudah tersedia jabatan, penerusnya dipilih oleh keluarga kerajaan, dibantu oleh para tetua seluruh kampung, dan dipilihlah yang paling cocok dari keluarga-keluarga tersebut.⁸³

H. Pendidikan

Secara umum, pendidikan di *Onderafdeeling* Enrekang masih sangat kurang dirasakan oleh masyarakat. Penyebab kurangnya minat masyarakat untuk bersekolah karena menurut segelintir orang biaya pendidikan agak mahal, jika dikaitkan dengan pendapatan penduduk yang relatif rendah. Pernyataan diatasi oleh B.H. Paerels, tidak benar, biaya sekolah anak-anak kampung membayar pajak 85% dalam waktu tiga tahun atau tidak dibayar sama sekali. Menurutnya pendidikan akan lebih bagus jika tidak dikenakan biaya.⁸⁴

Terdapat dua jenis sekolah yang didirikan *Onderafdeeling* Enrekang yaitu Sekolah Lanjutan (*Vervolgschool*) dan sekolah rakyat (*Vervolgschool*). Pada tanggal 1 Januari 1935, kedua sekolah ini telah berkembang dan telah dilakukan perluasan gedung. Pembukaan Sekolah Pertanian dan Kerajinan telah dibuka,

⁸³ J.A. Scheffelaar, *op.cit.*, hlm. 58.

⁸⁴ B.H. Paerels, *Agronomische beschrijving van de koffiecultuur in de Zuidelijke Toradjalanden, Mededeelingen Afdeeling Landbouw No. 11*, (Batavia: Departement van Landbouw, Nijverheid, en Handel, 1927), hlm. 90.

mengingat minat terhadap pendidikan pertanian dan kerajinan sangat besar. Diharapkan sekolah tersebut akan memberikan manfaat besar di *Onderafdeeling*.

Sekolah di *Onderafdeeling* Enrekang diperiksa secara berkala oleh Pengawas sekolah (*Schoolopziener*) di Pare-Pare, melapor ke Inspektur Pendidikan Pribumi Distrik 5 (*Inspecteur Inlandsch Onderwijs in het 5e ressort*) di Makassar. Melalui surat Gubernur Sulawesi dan Daerah Bawahannya (*Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden*) tanggal 28 November 1932 No. Pada 01/z/7 ditetapkan bahwa anak-anak yang terlambat 6 bulan biaya sekolah harus dikeluarkan.⁸⁵

Tabel 2.4. Daftar Sekolah Lanjutan (*Vervolgschool*) yang terdapat di *Onderafdeeling* Enrekang.

Lanskap	Kampong	Murid		Total
		Laki2	Perempuan	
Enrekang	Enrekang Vervolgschool	178	37	
		66	3	
Maiwa	Pasang	63	7	
Maiwa	Bungin	35	3	
Maiwa	Maroangin	38	2	
Maluwa	Maluwa	36	4	
Maluwa	Sossok	31	2	
Maluwa	Banti	28	8	
Bt. Batoe	Pasui	44	2	
Bt. Batoe	Gandang	27	2	
Alla	Kalosi	45	16	
Alla	Bt. Tangla	36	-	

Sumber: J.A. Scheffelaar, 1937, Nationaalarchief.

⁸⁵ J.A. Scheffelaar, *op.cit.*, hlm. 90-92.

Tabel 2.5. Sekolah Rakyat (*Volksschool*) di *Onderafdeeling* yang dikelola oleh Guru Dakwah (*Zendelingleeraar*) di Sangalla Makale.

<i>Landschap</i>	Kampung	Murid	
		Laki-laki	Perempuan
Alla (District Baroko)	Redak	59	6
Alla	Sitaru	87	6
Alla	Limbong	60	15

Sumber: J.A. Scheffelaar, 1937, Nationaalarchief.

Tabel 2.6. Ketentuan biaya Sekolah Lanjutan (*Vervolgschool*) dan sekolah rakyat (*Vervolgschool*).

Pajak	Anak ke-1	Anak ke-2	Anak ke-3	Anak ke-4
<i>Nihil</i> / Nol	<i>Vrij</i> / Bebas	-	-	-
Hingga f 4.-	f 0.05	-	-	-
f 4.- sampai f 8.80	f 0.10	f 0.05	-	-
f 8.80 sampai f 17.-	f 0.15	f 0.10	f 0.05	-
f 17.- sampai f 22.50	f 0.20	f 0.15	f 0.10	f 0.05
Paling Tinggi	f 0.25	f 0.20	f 0.15	f 0.10

Sumber: J.A. Scheffelaar, 1937, Nationaalarchief.

I. Stratifikasi Sosial

Pelapisan masyarakat atau stratifikasi sosial sangat penting untuk dipergunakan dalam mencari latar belakang mengenai pandangan hidup, watak atau sifat-sifat mendasar dari suatu masyarakat. Selain itu stratifikasi sosial dipergunakan untuk mengungkapkan hubungan-hubungan kejadian dalam masyarakat yang menyangkut tingkah laku segenap kegiatan termasuk dalam bidang politik.⁸⁶

⁸⁶ Mattulada, *Latoa Antropologi Politik Orang Bugis*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm. 28.

Kondisi sosial yang menunjukkan hubungan patron dan klien adalah adanya perbedaan penguasaan atas kedudukan (status), kekuasaan dan kekayaan. Perbedaan yang tampak dalam pemilikan atas tiga hal tersebut merupakan perwujudan dari sistem stratifikasi yang mendasari pertukaran vertikal yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut Adams (1975:31), mengatakan bahwa “*A thing is legitimate, then, when people agree that it is in some manner correct, proper, or the way it should be*” (sesuatu adalah sah bilamana orang sama-sama setuju bahwa hal itu boleh dikatakan betul, tepat, atau memang begitulah seharusnya). Hal ini berarti bahwa dalam membahas soal perbedaan status, kekuasaan dan kekayaan di Sulawesi Selatan kita harus membahas mulai dari pandangan orang Sulawesi Selatan sendiri mengenai status, kekuasaan dan kekayaan tersebut.⁸⁷

Menurut Friederich (1933), masyarakat Sulawesi Selatan pada dasarnya terdiri dari dua lapisan sosial yaitu lapisan bangsawan (*Anak Arung*) dan orang merdeka (*Maradeka*). *Ata* merupakan lapisan pelengkap mengikuti pertumbuhan kehidupan di Sulawesi Selatan.⁸⁸ Bangsawan merupakan lapisan teratas yang memiliki kedudukan politik, sosial dan ekonomi lebih tinggi.⁸⁹

Masyarakat *Massenrempulu* mengenal stratifikasi sosial yaitu sebagai berikut: a) Golongan *To Puang* (bangsawan), golongan yang menempati tingkat sosial yang tertinggi, dianggap oleh masyarakat sebagai keturunan langsung *Tu'manurung* dan merupakan pemegang kepemimpinan di Enrekang yang bergelar *To Makaka*. b) *To Maradeka* atau rakyat biasa, golongan menempati lapisan tengah dan merupakan objek utama dalam pembangunan. c) *To Kaunan* atau budak milik *To Puang*, menduduki lapisan terendah yang terdiri dari orang tawanan perang,

⁸⁷ Heddy Shri Ahimsa-Putra, *op.cit.*, hlm. 83-84.

⁸⁸ Mattulada, *op.cit.*, hlm. 35.

⁸⁹ Edward L. Poelinggomang. 2014, *loc.cit.*

orang-orang yang tidak mampu membayar hutang dan orang-orang yang melanggar adat.⁹⁰

Menurut G.A. Tideman, masyarakat *Massenrempulu* dibagi menjadi beberapa kelas sosial. Kelas tertinggi adalah *Aru, Aru* sebagai penguasa *Lili* dan keturunan mereka. Para penguasa dibagi lagi, yaitu Anak *Matola* adalah keturunan dari darah bangsawan murni, Anak *Radjeng Matasa* adalah status dari perkawinan antara bangsawan murni dengan rakyat biasa. Anak *Tjera* adalah anak dari seorang bangsawan murni menikah dengan wanita budak. Posisi kedua, Dewan Hadat yaitu *Sulewatang* dan *Pabicara* dan keturunan mereka. Posisi ketiga, perampok dan ulama pendatang. Posisi terakhir yaitu para budak dan keturunannya. Masyarakat menjadi budak karena dihukum dengan kejahatan tertentu dan orang-orang yang terlalu banyak memiliki hutang dan tidak mampu untuk membayarnya.⁹¹

2.3. Kondisi Ekonomi *Onderafdeeling* Enrekang.

Sistem perkebunan tradisional, bagi masyarakat di kepulauan Nusantara selama kurang lebih dua ribu tahun yang lalu secara bertahap telah mengembangkan dua tipe kegiatan pertanian, yaitu kegiatan pertanian yang menggarap tanaman subsisten dan yang menggarap tanaman perdagangan (*commercial crops*). Kegiatan pertanian tersebut menunjukkan keanekaragaman baik dalam segi tanaman, kepemilikan tanah, motif ekonomi, kebudayaan, teknologi dan lingkungan yang mempengaruhi pertanian. Berdasarkan ragam pertanian terdapat empat sistem pertanian yang telah dikenal di Indonesia yaitu (1) sistem perladangan (*shifting cultivation*), yaitu jenis kegiatan pertanian yang dilakukan secara berpindah-pindah, jenis tanaman berusia pendek, terutama tanaman pangan; (2) sistem persawahan (*wet rice cultivation system*); (3) sistem kebun (*garden system*) yaitu kegiatan pertanian yang menggarap tanaman berusia panjang (*perennial*) atau tanaman

⁹⁰ Nawir, dkk, *Inventarisasi Sumber Pada Masa Pendudukan Militer Jepang di Kabupaten Enrekang dan Tana Toraja 1942-1945*, (Sulawesi Selatan: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Proyek Pengkajian dan Pemanfaatan Sejarah dan Tradisi, 2002), hlm. 22.

⁹¹ G. A. Tideman, *op.cit.*, hlm. 10-11.

penghasil panen (*crops*) yang ditanam pada lahan tetap; dan (4) sistem tegalan (*dry field*), yaitu tipe kegiatan penanaman tanaman pangan (*food crops*) secara tetap pada daerah lahan kering.⁹² Adapun mata pencaharian penduduk di *Onderafdeeling* Enrekang adalah sebagai berikut:

2.3.1. Pertanian

Pertanian pada *Onderafdeeling* Enrekang dibagi dalam empat jenis, yaitu: Pembuatan Sawah; Pembuatan Ladang; Budidaya tanaman jangka panjang; dan Hortikultural.

A. Pembuatan Sawah

Pembuatan sawah dilakukan di lembah dan bukit sekitar irigasi. Lahan yang gundul dan medan yang cukup sulit, sehingga beberapa medan diperlukan sistem pipa yang rumit untuk mendapatkan pasukan air yang cukup. Misalnya, daerah Salukanan di Buntu Batu, telah diterapkan oleh penduduk sistem irigasi yang sangat rumit. Irigasi yang dibangun terlalu mengurus air di wilayah perairan untuk mengairi sawah-sawah di Kampung Pendokesan, Salogge, Awo, Gandeng, Mataring dan Pelapo. Produksi beras lebih unggul di daerah ini, yang memiliki harga yang lebih baik dibandingkan beras jenis lainnya. Irigasi tersebut berasal dari Sungai Pemandungan dan Sungai Ulu Padang.⁹³

Eksplorasi hutan sering terjadi di *Onderafdeeling* Enrekang, penduduk tidak tanggung-tanggung melakukan penebangan pohon untuk dibuat persawahan. Penebangan pohon secara liar memberikan dampak pada sumber air dan kebun kopi yang membutuhkan naungan. Akibat dari eksploitasi hutan oleh petani primitif, beberapa jagung dan tanaman kopi mati karena erosi, kurangnya naungan, dan humus. Eksploitasi hutan berdampak pula pada persawahan di lereng gunung yang kehilangan persediaan air. Langkah Pemerintah Hindia Belanda melihat kondisi tersebut dengan melakukan beberapa cara sebagai berikut: reboisasi, menyisakan

⁹² Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan Di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta, 1994), hlm. 15-16.

⁹³ J.A. Scheffelaar, *op.cit.*, hlm. 65.

pohon-pohon di wilayah sumber air; membasmi alang-alang; larangan membuka lahan di lereng gunung, jika masih ada lahan yang belum terpakai disekitar rumah; dan memperbanyak tenaga Dinas Penyuluhan Pertanian, sehingga peneduh, pembuatan terasering, pemupukan hijau, dan lain-lain, dengan cepat dapat dilaksanakan.⁹⁴

Pelaksana dalam perbaikan sistem persawahan dilakukan dengan formasi yang terdiri dari: pertama, seorang Pengawas Pertanian (*landbouwoezichter*) yang berdomisili di Kalosi. Pengawas tersebut harus menetap di *Onderafdeeling* Enrekang dan perlu melakukan kerja sama yang intensif dengan kepala *Onderafdeeling*. Lebih detail formasi yang dibentuk yaitu:

1. Pengawas Pertanian (*landbouwoezichter*) di Enrekang.
2. Seorang Menteri Pertanian (*landbouwmantrie*) di Kalosi dan seorang propagandis dadap (*dadappropagandist*).
3. Menteri pertanian (*landbouwmantrie*) di Pasui dan propagandis dadap.
4. Propagandis dadap (*dadappropagandist*) di Enrekang yang dapat ditugaskan oleh pengawas di Maiwa dan Enrekang bila diperlukan.

Wills diberikan tugas untuk menunjuk tiga orang dalam bagian Propagandis dadap (*dadappropagandist*), bagian tersebut atau menteri diisi oleh bangsawan dari wilayah tersebut. Telah menjadi kebiasaan dari para Kepala, ketika ada posisi yang diperlukan, maka mereka mencalonkan keponakan atau saudara laki-lakinya yang biasanya malas bekerja. Sebelum tahun 1938, biaya perjalanan seorang pengawas sebesar 15 gulden per bulan dan 5 gulden masih dapat ditambahkan.⁹⁵

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 66.

⁹⁵ J.A. Scheffelaar, *loc.cit.*

Tabel 3.1. Angka Ekspor Beras di Afdeeling Pare-Pare tahun 1928 sampai Maret 1933).

Tahun	Beras	
	(kg)	Nilai
1928	15.526.760	f 2.057.254
1929	17.284.663	f 2.380.313
1930	15.164.992	f 1.981.799
1931	4.927.241	f 424.402
1932	17.290.852	f 950.997
Januari/Maret 1933	4.319. 603	f 216.085

Sumber: J. Allaart, 1933, Nationaal Archief.

Pada tahun 1933, dibawah tekanan para Kepala Suku (*Hoofden*), seluruh *onderafdeeling* difokuskan pada pembuatan sawah. Persawahan besar yang telah ada dikerjakan ulang, pembuatan sawah-sawah baru dengan irigasi yang lebih teratur dibangun yaitu: di Buntu Batu; di Maluwa dan Sossok; di Alla dan Baroko (Buntu Tangla, Mundan, Batu Kede, Bossok, To'Cemba, Taulo, dan lain-lain); di Enrekang (Temban, Tungka, Garege, Balisu, dan Membura).⁹⁶

Harga beras turun menjadi f 2.- hingga f 2.50 per pikul. Penurunan harga mempengaruhi produksi padi menurun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut J. Allaart tahun 1933, hasil budidaya padi dilihat dari perkiraan Dinas Penerangan Pertanian (*Landbouwwoorlichtingdienst*) di *Afdeeling* Pare-Pare, seperti *Onderafdeeling* Pare-Pare menghasilkan beras 152.400 pikul, *Onderafdeeling* Barru menghasilkan beras 74.040 pikul, *Onderafdeeling* Pinrang

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 67.

menghasilkan beras 188.4000 pikul, *Onderafdeeling* Enrekang menghasilkan beras 28.560 pikul dan *Onderafdeeling* Sidenreng Rappang menghasilkan beras 413.600 pikul.

Tabel 3.3. Perbandingan antara sawah dan lahan kering pada pertengahan tahun 1935.

Lanskap	Per Kepala (<i>Hoofd</i>) dalam H.A	Skala
Enrekang	0.025 : 0.430	= 1 : 17
Maiwa	0.044 : 0.602	= 1 : 14
Buntu Batu	0.080 : 0.168	= 1 : 2
Maluwa	0.067 : 0.360	= 1 : 5
Alla	0.068 : 0.208	= 1 : 3

Sumber: J. Allaart, 1933, Nationaal Archief.

Pada tahun 1933, dilarang untuk sementara waktu untuk mengimpor beras dari luar Hindia Belanda selama empat bulan. Pada awalnya larangan ini berdampak pada kenaikan harga menjadi f 3.10 per pikul untuk beras kupas yang ditujukan untuk ekspor. Beberapa pabrik penggilingan padi telah didirikan di Pare-Pare yang menimbulkan persaingan dengan Persatuan Penggilingan Padi Sulawesi (*Vereenigde Rijstpellerijen Celebes*), yang mengakibatkan pabrik penggilingan padi di Pangkajene (Sidenreng) menjadi tidak terpakai.⁹⁷

Budidaya padi terutama ditanam pada lahan basah, untuk irigasi yang luas terkadang dibuat pipa air buatan. Di Maiwa persawahan terdapat pada lembah dekat dengan sungai. Di Enrekang, persawahan berada di Telaga dan Garutu. Di daerah pegunungan Latimojong di Duri, memiliki sedikit sawah karena kurangnya pasokan

⁹⁷ J. Allaart, *Aanvullende memorie van overgave van de afdeeling Pare-Pare*, (Pare-Pare: Dad. A, Afd. Cult. En Phys. Anthropologie Van Het Kon. Instituut Voor De Tropen, 1933), Nationaal Archief, hlm. 6.

air. Duri lebih merupakan lahan horticultural dan hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri untuk beras. Beras biasanya berasal dari daerah Bugis. Di Duri panen padi dua kali per tahun, menanam pada bulan Desember dan Januari. Di Enrekang menanam padi pada bulan Januari dan Februari, sedangkan di Maiwa menanam pada bulan Maret dan April.⁹⁸

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda dalam meningkatkan budidaya padi yaitu:

1. Memperbaiki pipa air pada musim kemarau.
2. Pemilihan benih yang baik.
3. Setelah penen, sawah dibiarkan kering untuk pengasaman.
4. Pemupukan dilakukan secepatnya dengan gaya Toraja (menempatkan ternak berada di lereng di atas sawah atau di atas pipa air, untuk menyediakan pupuk).
5. Memperbaiki galangan dengan cara memusnahkan sarang ret yang ada.
6. Budidaya palawija.

Pengawas pertanian dan stafnya harus menjaga hubungan baik dengan para penguasa lokal. Jika tuan-tuan penguasa lokal setuju dengan tujuan mereka, maka pekerjaan akan berjalan lancar. Tugas-tugas pengawas pertanian pada area persawahan masih berlanjut seperti: penyelesaian kompleks persawahan di Curio sampai Tanete; pembangunan jaringan pipa irigasi di Banti untuk Desa Loka, Bau, Darra, dan Tampaan; Irigasi Membura (proyek Ir Joekes); Irigasi Baraka di kiri kanan Salo Maluwa (proyek Ir Joekes); membangun sawah di Salo Biru, Maiwa; meletakkan matras di Salo Bungin untuk melindungi kompleks sawah di Bungin (Maluwa).⁹⁹

Penyebab kerugian dan gagal panen pada persawahan yaitu kekeringan, hama walangsangit, tikus, mencit dan babi. Pengendalian yang dilakukan pemilik sawah untuk mengatasi walang sangit yaitu walang sangit dijerat dengan menggunakan

⁹⁸ G.A Tideman, *op.cit.*, hlm. 8.

⁹⁹ J.A Scheffelaar, *op.cit.*, hlm. 67-68.

jaring kupu-kupu, membakar ikan busuk atau karet membuat binatang ini takut. Pengendalian tikus dan mencit harus dilakukan dengan pemberian racun, pasukan sarang, menjaga kebersihan galangan, dan menjaga pertumbuhan rumput tetap pendek. Penting juga untuk tidak menanam jagung dan tumbuhan lainnya di sekitar sawah. Babi dibasmi dengan racun atau dengan tombak.¹⁰⁰

Masyarakat memiliki kebiasaan mengklaim hak atas kepemilikan sawah yang telah bertahun-tahun tidak mereka garap dan telah dikerjakan dengan baik oleh orang lain selama beberapa tahun. Pada mulanya tanah tersebut adalah hal milik banua dan tidak ada seorang pun yang mempunyai kepemilikan perorangan atas tanah tersebut. Tanah yang telah terbengkalai dan kembali tandus bisa saja dialihkan kepada orang lain. Tanaman yang tumbuh pada tanah tersebut tetap menjadi hak milik perkebunan. Tanah tersebut dapat diambil alih dengan alasan sebagai berikut: ketika seorang menolak atau tidak menaati adat atau hadat; ketika seseorang meninggalkan kampung bersama keluarganya tanpa sepengetahuan kepala kampung; apabila lahan dibiarkan kosong selama bertahun-tahun.

Krisi ekonomi pada tahun 1933 dan 1934, membuat *zelfbestuur* mengumumkan kepada masyarakat bahwa para pemilik sawah akan dicabut haknya atas sebagian sawah miliknya yang akan diberikan kepada orang yang tidak memiliki sawah. Banyak sawah yang telah ditanami, tetapi beberapa petak telah berpindah tangan. Di Duri, padi baru siap panen setelah enam hingga tujuh bulan, bahkan di beberapa tempat lebih lambat lagi. Padi gogo biasanya dipanen setelah tiga atau empat bulan. Padi gogo adalah jenis padi yang tidak ditanam di sawah seperti padi umumnya. Jenis padi ini ditanam di kebun atau di ladang. Kelebihan padi gogo adalah tidak memerlukan irigasi khusus.¹⁰¹

B. Pembuatan Ladang

Pembuatan ladang merupakan langkah pertama dari sumber kebutuhan pangan bagi *onderafdeeling* Enrekang. Pengolahan tanah digunakan *pekali* yaitu

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 68.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 69.

sejenis besi dengan ujung yang pipih pada tongkat kayu yang kokoh. *Pekali* digunakan untuk membuat lobang pada tanah sedalam lebih dari satu kaki. Pengawas pertanian Belanda membantu penduduk dengan melakukan upaya peningkatan kualitas tanah menggunakan pupuk hijau dan perata lereng. Di Buntu Batu percobaan pupuk hijau/humus dan jangkar lereng dengan melakukan penanaman pohon *Crotalaria anagyroides*, Gr. *Usaramoensis*, *Tephrosia Candida*, dan *T.Vogelii*.

Berdasarkan percobaan pengawas pertanian, telah ditemukan bahwa *T.Vogelii* dan Gr.*Anagyroides* adalah tumbuhan yang paling cocok sebagai jangkar lereng. Di Bt.Batoe penduduknya telah menggunakan apa yang disebut “*poeding*” (Gr.*Pictum*) sebagai jangkar lereng selama bertahun-tahun. Efektifitas budidaya ladang dilakukan dengan masa istirahat singkat (3-5 tahun masa kerja) dan (3-5 tahun masa istirahat), percobaan dilakukan dengan menggunakan pupuk hijau pada tahun terakhir masa kerja. Spesies *Tephrosia* yang digunakan terbukti sangat baik. Sebagai upaya lebih lanjut penanaman dadap pada tahun pertama atau kedua masa pendudukan dilakukan di wilayah Salo Kanan di ladang terbuka. Pengawas pertanian Belanda telah dengan giat melakukan sosialisasi untuk jarak tanaman harus 3 sampai 4 M dan di sela-sela tugas dia memperkenalkan penanaman kacang tanah, dan upaya ini berjalan sukses. Tumbuhan yang ditanam pada ladang yaitu jagung, padi gogo, millet, kentang, kubis, kacang tanah dan ubi jalar.¹⁰²

C. Budidaya Tanaman Jangka Panjang

Kopi dibudidayakan di *Onderafdeeling* Enrekang pada wilayah-wilayah tertentu. Area utama penanaman kopi yang diberi label Kopi Bungin yaitu, terumbu kapur Baroko-Sossok, Salo Kanan, Lereng Buntu Semui, Lereng Puang Lamui dan Buntu Setan (Maiwa), Lereng Gunung Latimojong di lembah Sungai Bungin (Sawitto dan Natting), Lereng Gunung Latimojong di Talimbangan-Bangkan, Lereng Gunung Latimojong di Langai-Rante Lemo, dan Parombean-Sarang-Latobara. J A. Scheffelaar, luas perkebunan yang telah disebutkan memiliki luas 800 meter. Budidaya kopi memainkan peranan utama di Duri, banyak pohon kopi

¹⁰² J.A. Scheffelaar, *loc.cit.*

di perkebunan tua penduduk telah dilakukan pemulihan, pemeliharaan dan tanaman kopi baru sedang di tata. Peran Dinas Penyuluhan Pertanian Belanda sangat diperlukan dalam pengembangan penanaman kopi, misalnya di Banti dan Tobalu (Enrekang).¹⁰³

Tabel 3.4. Angka ekspor di Afdeeling Pare-Pare untuk kopra dan kapuk tahun 1928 hingga Maret 1933.

Tahun	Kopra		Kapuk	
	(kg)	Nilai	Kg	Nilai
1928	1.524.924	f 368.344	5.681	f 1.642
1929	1.314.299	f 278.027	9.438	f 2.189
1930	854.724	f 168.789	22.741	f 3.717
1931	239.747	f 34.855	88.015	f 9.557
1932	286.867	f 23.810	254.779	f 20.383
Januari/Maret 1933	105.486	f 8.820	253.643	f 20.964

Sumber: J. Allaart, 1933, Nationaal Archief.

Budidaya tembakau juga tidak kalah pentingnya yang ditanam di sekitar terumbu kapur di Baroko. Tembakau secara khusus ditanam oleh penduduk di tempat bekas kerbau. Penyiapan tembakau sudah lebih baik dari sebelumnya, pisau dan bangku takik kini telah diperkenalkan. Tembakau diekspor ke Makale. Tahun 1936 uji coba penanaman tembakau dilakukan di Membura-Enrekang, dan

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 70.

memberikan hasil yang luar biasa. Tembakau menghasilkan panen yang cukup besar, tetapi permintaan untuk tembakau sangat sedikit.¹⁰⁴

Budidaya kelapa terbukti sukses. Penanaman kelapa secara rutin terus dilakukan. Kelapa tumbuh dengan baik, karena pengawasan ketat terhadap pembersihan secara rutin dilakukan. Tahun 1934 kopra mengalami kenaikan harga *f* 1, untuk minyak dari *f* 0.075 menjadi *f* 0.225. Hama kutu putih yang menyerang kelapa dilawan dengan melepaskan parasit di Kampung Bamba, namun percobaan ini tidak berhasil.¹⁰⁵

Budidaya kapuk pada tahun 1937 kembali menjadi perhatian masyarakat. Alasan masyarakat kembali merawat pohon-pohon kapuk, karena kapuk mengalami kenaikan yang dulunya sangat rendah kini menjadi *f* 5.50 per pikul. Kapuk hanya boleh diperdagangkan di jalan masuk Enrekang, Kabere dan Maroangin, karena adanya pengendalian harga. Tahun 1937 diperoleh hasil panen lebih dari 2.000 pikul telah diperdagangkan. Harapan akan lebih meningkat di tahun 1938.¹⁰⁶

Kemiri banyak ditanam di Enrekang dan Maiwa, namun dengan pasukan yang banyak tetapi harganya tahun 1937 sangat rendah yaitu *f* 3 per pikul. Pohon aren banyak tumbuh di Enrekang, yaitu disepanjang Sadang, Kabere, Baka dan Osso, Lilih Topang, Maiwa, Talimbang, Uru dan Buntu Batu. Nira aren adalah cairan yang diperoleh dari bagian tangkai bunga aren diolah menjadi gula. Hasil produksi gula kemudian di ekspor ke Pare-Pare. Hasil nira aren yang dihasilkan pohon-pohon aren di daerah Duri, tidak diolah menjadi gula tetapi dikonsumsi dalam bentuk minuman yang disebut *tuak*. Hal ini didasarkan pada pemali masyarakat setempat, bahwa pemali ketika membuat gula dari nira aren, karena

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 71.

¹⁰⁵ J.A. Scheffelaar, *loc.cit.*

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 72.

tanahnya akan menjadi coklat dan tandus. Pohon buah-buahan banyak ditemukan di Lolih Tapong (Maiwa) durian dan langsung di Maroangin.¹⁰⁷

Tabel 3.5. Angka ekspor di *Afdeeling* Pare-Pare untuk kemiri tahun 1928 hingga Maret 1933.

Tahun	Kemiri	
	(kg)	Nilai
1928	655.031	f 98.255
1929	529.697	f 89.455
1930	760.433	f 125.278
1931	570.237	f 89.977
1932	636.497	f 95.475
Januari/Maret 1933	96.126	f 14.422

Sumber: J. Allaart, 1933, Nationaal Archief.

D. Hortikultural.

Berdasarkan karakteristik *Onderafdeeling* Enrekang menjadi salah satu wilayah yang strategis untuk pengembangan tanaman hortikultural di Celebes. Hortikultural adalah budidaya tanaman di kebun atau di sekitar tempat tinggal.¹⁰⁸ Di sekitar perkampungan telah dibuat kebun-kebun permanen tempat membudidayakan beberapa jenis tanaman dan dirawat dengan baik. Jenis-jenis

¹⁰⁷ J.A Scheffelaar, *loc.cit.*

¹⁰⁸ Fitrawahyudi dkk, *Vitalitas Bahasa Daerah Massenrempulu di Kabupaten Enrekang*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022), hlm. 72.

tanaman tersebut yaitu ubi, kentang, kacang, jagung, sayur-sayuran, millet, lombok, timun, terong, dan bawang bombay. Selain itu terdapat pula pasang, nangka, kopi, sukun, pasang raja, dan lain-lain.¹⁰⁹

2.3.2. Ternak

Menurut J.A Scheffelaar penggembalaan ternak masih membutuhkan banyak perhatian di *Onderafdeeling* Enrekang khususnya di lanskap Maiwa dan Enrekang. Pemerintah terus memberikan tekanan ke arah yang menguntungkan, tetapi hasilnya belum bagus. Pada tahun-tahun krisis banyak kerbau dijual keluar *onderafdeeling*, terutama ke daerah yang banyak membeli kerbau seperti Makassar, Sidenreng Rappang, dan Wajo. Harga kerbau turun pada tahun 1934 dan 1935 menjadi *f* 6 (6 gulden) dan *f* 7 (7 Gulden) per ekor, kuda dari harga *f* 10 menjadi *f* 7.50, dan kambing *f* 2.50 menjadi *f* 0.75.

Tabel 3.6. Jumlah ternak di *Onderafdeeling* Enrekang bulan Maret 1937.

<i>Lanskap</i>	Kuda	Kerbau	Kambing	Babi
Enrekang	662	2.383	2.630	73
Maiwa	939	2.644	612	-
Alla	1.051	3.774	792	365
Maluwa	699	2.106	2.016	-
Bonto-Batu	247	1.442	1.984	-
Jumlah	3.598	12.349	8.034	438
Total	24.419 Ekor			

Sumber: J.A Scheffelaar, 1937, Nationaal Archief.

Pada bulan September 1936 hewan-hewan ternak mengalami peningkatan harga yang cukup besar, kerbau saat itu dijual dengan harga *f* 12.50 hingga *f* 30.-

¹⁰⁹ J.A Scheffelaar, *loc.cit.*

per ekor, kuda yang mendapat permintaan banyak dari Poso seharga f 20.- hingga f 35.- per ekor, dan kambing dengan harga f 2.- hingga f 5.- per ekor. Kenaikan harga secara signifikan merupakan dampak dari pemilihan ekonomi yang memberikan manfaat sampai ke desa-desa terpencil di *Onderafdeeling* Enrekang. Kenaikan harga ternak mengakibatkan jumlah pencurian ternak semakin meningkat pada tahun 1936. Tingkat tertinggi pencurian ternak terjadi di Maiwa, sehingga langkah yang sangat diperlukan oleh *zelfbestuur* yaitu membuat tanda untuk ternaknya yang berbeda setiap kampung. Ternak setiap *lanskap* diberi tanda dengan huruf-huruf sebagai penanda yaitu sebagai berikut: Enrekang – O, Banti – N, Maiwa – O.V, Alla – A, Maluwa – D, Buntu Batu – B, Sossok – L, dan tanda ternak yang ditolak – S.¹¹⁰

2.4. Sejarah Singkat *Massenrempulu*

Sejak abad XIV, Ke-Aru-an Endekan atau Enrekang diperkirakan sudah terbentuk di *Massenrempulu*.¹¹¹ Pada masa pemerintahan Puang Landek di Suqpi yang merupakan cucu Puang Tamborok Langik dan keturunan Sawerigading (putra Datu Luwu'La Tiuleng), bernama *Puang* Pagonggang (saudara Tomalangek, *Aru* Duri pertama) memerangi para Ke-Aru-an atau *Lembang*, yaitu kepala-kepala persekutuan adat Toraja. *Aruan Patampulo* (40 orang *Aruan*) berhasil dikalahkan dan ditaklukan, kecuali tiga Ke-Aru-an yang berhasil melarikan diri ke Barat, yaitu Ke-Aru-an Maiwa, Ke-Aru-an Kassa dan Ke-Aru-an Bungin, yang kemudian berfederasi dengan Duri dan Enrekang yang dinamakan *Massenrempulu*. Salah seorang *Aru* wanita bernama Embong Bulan, juga pindah ke Kaluppini (Enrekang) dan kawin dengan Bali Pada (*Aru* pertama Enrekang). Bali Pada dan istrinya Embong Bulan dikisahkan sebagai *Tu'manurung*.¹¹²

Semula Federasi *Massenrempulu* yang telah berdiri berabad-abad tahun lamanya disebut *Pitu Massenrempulu* meliputi wilayah Ke-Aru-an Kassa, Batu

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 73.

¹¹¹ Zainal Abidin, *op.cit.*, hlm. 116.

¹¹² *Ibid.*, hlm. 118.

Lappa, Letta, Endekan/Enrekang, Binaung, Pituriase dan wilayah Ke-Aru-an Duri. Federasi *Massenrempulu* kemudian berubah sekitar tahun 1685 akibat terbunuhnya utusan Bone di Letta. Sejak Letta ditaklukan oleh Bone dibawah pimpinan Arung Palakka Petta Malampe'e Gemme'na, maka Letta dikeluarkan dari *Massenrempulu*. Sedangkan Maiwa yang sebelumnya bagian dari Sidenreng dimasukkan dalam persekutuan *Massenrempulu*.¹¹³ Sejak itu Federasi *Massenrempulu* dikenal dengan istilah *Lima Massenrempulu*, yaitu gabungan dari Ke-Aru-an Endekan (Enrekang), Ke-Aru-an Maiwa, Ke-Aru-an Malua, Ke-Aru-an Alla dan Ke-Aru-an Buntu Batu.¹¹⁴

Pada tahun 1824, kelima Ke-Aru-an *Massenrempulu* mengirimkan utusan konfederasi ke Makassar dengan permintaan agar diizinkan bergabung dalam kontrak Perjanjian Bongaya yang telah diperbaharui. Permintaan tersebut ditolak karena Pemerintah Hindia Belanda ingin berbicara langsung dengan para Aru di *Massenrempulu*. Berdasarkan Surat Keputusan pada 26 November 1825 no.7, Gubernur Makassar diberi wewenang untuk memasukkan *Massenrempulu* kedalam kontak tersebut, namun tidak dilaksanakan.

Pada tahun 1866, Duri ditaklukan oleh Pangeran Sidenreng La Pangorise ng. Pada tanggal 30 September 1890 La Gali dari Maiwa menandatangani kontrak dengan Pemerintah Hindia Belanda atas nama Duri, kemudian diratifikasi pada bulan Oktober 1891. Pada tahun 1896, orang-orang dari Bone menyerbu hingga ke Tanah Toraja, melawan Ke-Aru-an Enrekang, Duri, Toraja, dan Sidenreng yang dipimpin oleh Taraka Puanna Cimpau.¹¹⁵

Pada tahun 1905 serangan militer yang disebut *Zuid Celebes Expeditie* dilancarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.¹¹⁶ Oktober 1905 serdadu kompeni

¹¹³ J.A. Scheffelaar, *op.cit.*, hlm.122.

¹¹⁴ Edward L. Poelinggomang. 2014, *op.cit.*, hlm. 76-77.

¹¹⁵ J.A. Scheffelaar, *loc.cit.*

¹¹⁶ Edward L. Poelinggomang, 2015, *op.cit.*, hlm. 17-18.

menyerang wilayah *Massenrempulu*, dengan fokus dan tujuan merebut pusat Ke-Aru-an Enrekang. Aru Enrekang pada saat itu Pancaitana Bungawalie memimpin laskar dan rakyat untuk melakukan perlawanan. Kedatangan serdadu Belanda telah diketahui sebelumnya oleh para Ke-Aru-an di *Massenrempulu*, melalui surat dari La Pawawoi Arumpone kepada Aru Maiwa yang isinya antara lain: a) Diminta agar Aru Maiwa membicarakan dengan Datu Enrekang, Aru Baroko, Duri dan Aru Makale Sangalla dalam upaya menghadapi La Pute Mata (Belanda). b) Kalau perlu adakan perlawanan, kalau tidak bisa minimal membuat mereka tidak senang tinggal. c) supaya dikorbankan persatuan dan setia kawan.¹¹⁷

Dalam menindaklanjuti surat tersebut, maka pada awal tahun 1905 dilaksanakan konfederasi para Aru yang tergabung dalam Federasi *Massenrempulu* di Kotu. Konfederasi dihadiri oleh Aru Maiwa, Aru Enrekang, Aru Baroko, Aru Makale beserta dengan para *Matoa* kampung dan utusan raja Bone. Konfederasi menghasilkan keputusan antara lain: a) Di seluruh wilayah Ke-Aru-an masing-masing mengadakan perlawanan semaksimal mungkin. b) Demi kesetiakawanan perlu memberikan bantuan kepada Arumpone.¹¹⁸

Dalam penyerangan ke *Massenrempulu* serdadu Belanda menempatkan pasukannya di Maroangin dan Enrekang. Pada 14 Oktober pasukan Belanda yang dipimpin oleh Let. Kol Van Bennekom sudah mencapai Kalosi, kemudian bergabung dengan pasukan Belanda lainnya yang datang dari Rantepao yang dipimpin oleh Great Mayor de Wijd. Pasukan Belanda berkekuatan 6 *brigade* dengan jumlah serdadu 500 personil dengan persenjataan lengkap. Pasukan inilah yang kemudian mengalahkan para Ke-Aru-an di *Massenrempulu* seperti Ke-Aru-an Maiwa, Enrekang dan Duri. Perang tersebut yang kemudian membawa para Ke-Aru-an di *Massenrempulu* harus menandatangani Pernyataan Pendek (*Korte Verklaring*) pada awal tahun 1909 di Pare-Pare.¹¹⁹

¹¹⁷ Abd. Latif, Nordin Hussin, *op.cit.*, hlm. 276-281.

¹¹⁸ Mohammad Natsir Sitonda. 2013, *op.cit.*, hlm. 7.

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

Pemerintahan *Massenrempulu* diatur oleh *Korte Verklaring*, yang pertama menandatangani yaitu Ke-Aru-an Maiwa pada 27 Oktober 1905 (disetujui 19 Juli 1906), Ke-Aru-an Enrekang pada 4 Maret 1906 (disetujui 19 Juli 1906).¹²⁰ Pada tanggal 11 Januari 1909 diadakan pertemuan tiga *Zelfbestuur* Duri yaitu Ke-Aru-an Aru Alla, Aru Maluwa, dan Aru Buntu Batu, masing-masing menandatangani *Korte Verklaring* secara terpisah yang disahkan pada tanggal 9 Juni 1909.¹²¹

Dalam Lembaran Negara (*Staatsblad van Nederlandsch-Indie*) tahun 1917, No. 249 dinyatakan bahwa Konfederasi *Massenrempulu* menjadi satu *Onderafdeeling* dari *Afdeeling* Pare-Pare dengan sebutan *Onderafdeeling* Enrekang yang terdiri dari lima *Landschap* Enrekang, Maiwa dan Federasi Duri yang terdiri dari *Landschap* Malua, Alla dan Buntu Batu.¹²² *Lanskap* tersebut masing-masing diatur oleh seorang Aru dengan Hadat yang dipimpin oleh seorang Pejabat Eropa (*Controleur* atau *Officer*). Federasi Duri dibawah *Zelfbestuur* Buntu Batu, Malua, dan Alla membentuk aliansi “*Tallu Batu Papan*”.¹²³ Pada tahun 1933, Pemerintah Hindia Belanda mengubah istilah *Onderafdeeling* dengan *Swapraja* atau daerah berpemerintahan sendiri (*Zelfbestuure Landschap*).

¹²⁰ G. A. Tideman, *op.cit.*, hlm. 6.

¹²¹ J.A. Scheffelaar, *op.cit.*, hlm. 123.

¹²² Edward L. Poelinggomang. 2015, *ibid.*, hlm. 79-80.

¹²³ J.A. Scheffelaar, *loc.cit.*